



**IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA DALAM  
KEGIATAN KARANG TARUNA KARYA ABADI DI DESA JEPANG  
KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

Setiana Eka Rini

3301411139

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke  
Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 6 November 2015

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc.

NIP. 19480609197603 1 001

Dosen Pembimbing II



Drs. Suprayogi, M.Pd

NIP. 19580905198503 1 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Slamet Sumarto, M. Pd.

NIP. 19610127198601 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas negeri Semarang:

Hari : Selasa

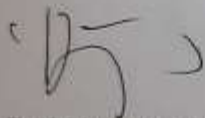
Tanggal : 17 November 2015

Penguji I



Dr. Eko Handoyo, M.Si  
NIP. 196406081988031001

Penguji II



Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc.  
NIP. 194806091976031001

Penguji III



Drs. Suprayogi, M.Pd.  
NIP. 195809051985031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu sosial



Drs. M. Solihatul Mustofa, M.A.  
NIP. 195308021988031001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode ilmiah.

Semarang, September 2015

Penulis,



Setiana Eka Rini

NIM. 3301411139

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

- ❖ “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (*QS. Al-Insyirah* 94 : 5-6).
- ❖ “Keluargamu adalah alasan bagi kerja kerasmu dan sebagai penguat usaha dan cita-citamu (Mario Teguh).
- ❖ Setiap perbedaan pendapat ataupun pertentangan politik hendaknya diselesaikan secara musyawarah dan damai (Prabowo Subianto).

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibu terimakasih atas segala do'a, dukungan, dan kasih sayangnya.
2. M. Setiawan Dwi Saputro adikku tersayang.
3. Ahmad Zahry Mujadid sebagai penginspirasi dan semangatku yang selalu senantiasa mendampingi.
4. Keluarga tercinta, terimakasih atas segala do'a dan dukungannya.
5. Teman-teman seperjuangan PKn '11 yang menjadi pemicu semangatku.

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.”.

Penulis menyadari bahawa dalam penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan sumbang saran dari segala pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd., Ketua Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
4. Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc., dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi bagi penulis dalam menyusun skripsi.
5. Drs. Suprayogi, M.Pd., dosen pembimbing II yang tidak lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

7. Seluruh Staf Karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
8. Indarto, S.T., Kepala Desa Jepang yang telah memberikan ijin penelitian, serta pihak Karang Taruna Karya Abadi yang telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam terlaksananya penelitian ini.
9. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan saya doa, kasih sayang, semangat, dan dukungan dalam hidup yang tak ternilai harganya.
10. Teman-teman yang bersedia membantu dan selalu menyemangati dalam pembuatan skripsi ini, Titik, Dwi, Arif, Laily terimakasih atas bantuan kalian.
11. Teman-teman PKn angkatan 2011 yang telah memberikan semangat dan doanya.
12. Keluarga besar SK-UMB, MBDS, BSG Jateng terimakasih atas doa dan semangatnya.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia pada umumnya dan bermanfaat bagi para pembaca pada khususnya.

Semarang, September 2015

Penulis

## SARI

**Rini, Setiana Eka.** 2015. *Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc., Pembimbing II : Drs. Suprayogi, M.Pd.

**Kata Kunci : Implementasi, nilai Demokrasi Pancasila, kegiatan Karang Taruna**

Penerapan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam semua lapisan masyarakat dan organisasi masyarakat perlu dilakukan. Salah satu organisasi kemasyarakatan yang menampung aspirasi dan melibatkan generasi muda di Indonesia adalah organisasi Karang Taruna. Nilai Demokrasi Pancasila itu sendiri dapat diterapkan ketika menjalankan suatu program kegiatan Karang Taruna itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kudus (2) mengetahui faktor pendorong implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kudus (3) mengetahui faktor penghambat implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kudus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Karang Taruna Karya Abadi Desa Jepang. Sumber data penelitian ini adalah pengurus Karang Taruna, anggota Karang Taruna, pihak kelurahan. Fokus penelitian ini adalah implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi dalam hal perencanaan program kegiatan, wujud pelaksanaan program kegiatan, dan evaluasi program kegiatan, serta faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai Demokrasi Pancasila dapat diketahui dari beberapa kegiatan Karang Taruna salah satunya dalam bidang seni dan olahraga yaitu saling percaya kepada tim, serta memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama saat melaksanakan olahraga voly. Dalam bidang lingkungan hidup dan pariwisata adanya kegotong-royongan, serta mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan kerja bakti, selain itu memiliki rasa itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dalam bidang kerohanian adanya tanggungjawab moral kepada



Tuhan Yang Maha Esa saat melaksanakan pengajian, dan dalam bidang humas dan pengembangan komunikasi yaitu memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama serta menghargai hak asasi manusia saat pelaksanaan perlombaan memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke 70. Selain itu, implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna juga terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong dalam implementasi nilai demokrasi Pancasila adalah adanya dukungan dari pihak kelurahan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana ketika kegiatan Karang Taruna itu berlangsung. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi nilai Demokrasi Pancasila adalah kurang aktifnya anggota Karang Taruna itu sendiri, karena partisipasi anggota sangatlah penting dalam kegiatan Karang Taruna. Selain itu, kesibukan anggota diluar kegiatan Karang Taruna juga sangat berpengaruh dalam implementasi nilai Demokrasi Pancasila, karena tidak selamanya anggota Karang Taruna akan berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan Karang Taruna. Hal ini yang menyebabkan susah nya para anggota Karang Taruna untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan Karang Taruna, karena kesibukan anggota diluar kegiatan Karang Taruna itu sendiri.

Melalui penelitian ini disarankan: 1) Karang Taruna Karya Abadi hendaknya memikirkan sumber daya kelompok yang semakin berkurang serta membenahan struktur kelompok, 2) seharusnya pengurus atau anggota Karang Taruna Karya Abadi lebih memahami akan tugas dan tanggungjawab yang diimban, 3) hendaknya pihak kelurahan mendampingi pengurus Karang Taruna serta ikut membantu mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Karang Taruna.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>SARI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penegasan Istilah.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Implementasi Nilai .....	11
1. Pengertian Nilai.....	11
2. Fungsi Nilai Bagi Kehidupan Manusia .....	13
3. Macam-macam Nilai dan Tingkatannya .....	15
4. Model-model Penanaman Nilai.....	16
5. Model Implementasi Nilai.....	19
B. Demokrasi Pancasila .....	20
1. Kedudukan Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia .....	20
2. Pengertian Demokrasi dan Negara Demokrasi .....	23

3. Macam-macam Demokrasi dan Perkembangan di Indonesia .....	27
4. Demokrasi Pancasila dan Karakteristiknya.....	31
5. Nilai-nilai Demokrasi Pancasila.....	37
C. Karang Taruna.....	39
1. Pengertian Karang Taruna.....	39
2. Karang Taruna Sebagai Organisasi Kepemudaan.....	40
3. Tujuan dan Progam Kerja Karang Taruna .....	42
4. Fungsi Karang Taruna dalam Pembinaan dan Pengembangan generasi Muda Indonesia .....	44
5. Pelaksanaan demokrasi pancasila dalam kegiatan Karang Taruna .....	45
D. Kerangka Berpikir.....	46

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Dasar Penelitian .....	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Fokus Penelitian.....	50
D. Sumber Data Penelitian.....	51
a. Data Primer .....	51
b. Data Sekunder .....	51
E. Metode Pengumpulan Data.....	52
a. Observasi.....	52
b. Wawancara.....	53
c. Dokumentasi .....	54
F. Validitas Data.....	54
G. Teknis Analisis Data .....	55
H. Prosedur Penelitian.....	56

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	58
1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	58
a. Keadaan Geografis Wilayah Desa Jepang .....	58

b.	Keadaan Demografis Wilayah Desa Jepang .....	59
c.	Keadaan Sosial Ekonomi Wilayah Desa Jepang .....	60
d.	Karang Taruna di Desa Jepang .....	61
e.	Karang Taruna dalam Pembangunan Desa .....	62
2.	Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila dalam Kegiatan Karang Taruna di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus .....	64
a.	Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila dalam Kegiatan Karang Taruna di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus .....	68
1)	Perencanaan Progam Kegiatan Karang Taruna .....	68
2)	Wujud Pelaksanaan Progam Kegiatan Karang Taruna.....	70
3)	Evaluasi Progam Kegiatan karang Taruna.....	72
4)	Tata Cara Pergaulan dalam Kegiatan Karang Taruna .....	73
b.	Faktor Pendorong Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila dalam Kegiatan Karang Taruna di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus .....	75
1)	Sarana dan Prasarana .....	76
2)	Dukungan dari Pihak Kelurahan.....	78
c.	Faktor Penghambat Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila dalam Kegiatan Karang Taruna di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus .....	79
1)	Kurangnya partisipasi Anggota .....	79
2)	Kesibukan Anggota Diluar Kegiatan Karang Taruna.....	80
B.	PEMBAHASAN .....	80
1.	Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila dalam Kegiatan Karang Taruna di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.....	81
2.	Faktor Pendorong Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila dalam Kegiatan Karang Taruna di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus .....	83

3. Faktor Penghambat Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila dalam Kegiatan Karang Taruna di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Simpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Reorganisasi Karang Taruna Karya Abadi.....	65
Gambar 2. Remaja Desa Jepang dalam kegiatan bidang seni .....	66
Gambar 3. Rapat persiapan hari kemerdekaan RI ke 70 .....	69
Gambar 4. Kegiatan perlombaan dalam rangka hari kemerdekaan RI ke 70.....	71
Gambar 5. Kegiatan kerja bakti .....	72
Gambar 6. Kegiatan olahraga.....	72
Gambar 7. Antusias pihak kelurahan dalam kegiatan perlombaan dalam rangka hari kemerdekaan RI ke 70.....	76
Gambar 8. Salah satu ruko yang diberikan kepada Karang Taruna.....	77

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Fakultas

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di Desa Jepang

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 4. Struktur Organisasi Karang Taruna Karya Abadi Periode 2015-2018

Lampiran 5. Rancangan Instrumen Penelitian

Lampiran 6. Pedoman Observasi

Lampiran 7. Pedoman Dokumentasi

Lampiran 8. Pedoman Wawancara

Lampiran 9. Daftar Nama Informan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kata Demokrasi. Membahas demokrasi berarti menghadapi pada suatu kompleksitas permasalahan yang klasik, fundamental, namun tetap aktual. Dikatakan klasik karena masalah demokrasi sudah menjadi fokus perhatian dalam wacana filsafati semenjak zaman Yunani kuno, dan telah diterapkan di *polish* Athena. Fundamental karena hakikat demokrasi menyentuh nilai-nilai dasar kehidupan tentang apa dan bagaimana sistem kehidupan itu akan dipergunakan di mana manusia sendiri menjadi subyek dan sekaligus dijadikan obyeknya. Aktual karena dewasa ini demokrasi menjadi dambaan setiap bangsa dan negara untuk menerapkannya, termasuk bangsa Indonesia dalam era reformasi ini (Suyahmo, 2014 :1).

Demokrasi yang dihayati oleh masyarakat Indonesia bukanlah tiruan demokrasi dari bangsa lain, melainkan lahir dari nilai-nilai luhur budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Para pendiri bangsa menetapkan bahwa dasar kehidupan demokrasi Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila dikenal dengan cara permusyawaratan antara semua anggota keluarga besar bangsa



Indonesia untuk mencapai mufakat guna mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

Demokrasi merupakan suatu kerja kultural, sosial, dan politik sekaligus. Demokrasi juga membangun sikap mental, spirit, yang merupakan nilai dari demokrasi itu sendiri, semisal kesamaan, toleransi, dan kebebasan. Demokrasi memang bersangkutan dengan nilai kebebasan, tetapi kebebasan yang berlandaskan peraturan yang telah berlaku.

Nilai Demokrasi Pancasila penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti halnya dalam melaksanakan suatu kegiatan di Karang Taruna, agar terjalin kerjasama antara warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan suatu kegiatan. Nilai Demokrasi Pancasila perlu ditanamkan kepada setiap warga negara secara terus menerus dan berkesinambungan, khususnya pada generasi muda.

Demokrasi memiliki nilai – nilai, antara lain kebebasan, hak – hak individu, tujuan bersama, keadilan dan patriotisme (Zamroni, 2011:126). Dalam rangka membiasakan diri memiliki sikap sesuai dengan nilai Demokrasi Pancasila, perludilakukan tindakan yang dapat mengimplementasikan nilai Demokrasi Pancasila itu sendiri. Berhubung demokrasi tidak memberikan jaminan bahwa proses yang berlangsung pasti akan mengantarkan bangsa ke dalam suatu kehidupan yang demokratis, maka di dalam masyarakat itu sendiri khususnya para generasi muda harus ditanamkan nilai demokrasi Pancasila guna mencapai tujuan

dan kepentingan bersama, misalnya dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat.

Salah satu organisasi kemasyarakatan yang menampung aspirasi dan melibatkan generasi muda di Indonesia adalah Karang Taruna. Dalam buku pedoman Karang Taruna tahun 2005, yang dimaksud Karang Taruna adalah organisasi sosial sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran jiwa dan tanggung jawab sosial, dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda yang berada di wilayah desa atau komunitas dan juga bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial guna kemajuan bersama.

Karang Taruna merupakan organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa, dan karya di bidang kesejahteraan sosial. Dengan adanya hal tersebut, maka nilai-nilai Demokrasi Pancasila dapat diterapkan dalam menjalankan suatu program Karang Taruna itu sendiri.

Memperhatikan fungsi strategis Karang Taruna tersebut, maka penerapan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam organisasi masyarakat khususnya dalam kegiatan Karang Taruna perlu diterapkan untuk menghadapi perubahan global seiring dengan keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia. Dengan demikian generasi muda sebagai sumber daya manusia yang bermutu dan profesional harus menyiapkan generasi muda yang demokratis, sehingga

memiliki karakter daya tahan yang kokoh di tengah-tengah konflik peradaban.

Penanaman nilai Demokrasi Pancasila ini biasanya dilakukan dengan mengajarkan kepada remaja tentang nilai Demokrasi Pancasila, misalnya melalui kegiatan Karang Taruna, dalam menjalankan programnya sering dijumpai banyak permasalahan yang terjadi di dalam organisasi ini seperti tidak berjalannya suatu kegiatan atau lain sebagainya karena adanya beberapa faktor yang terjadi. Dalam hal ini permasalahan yang terjadi diatas dialami oleh Karang Taruna Karya Abadi. Oleh karena itu dengan adanya implementasi Demokrasi Pancasila para remaja akan terbiasa untuk menerapkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat yang akan sangat berguna untuk kehidupannya di masa mendatang.

Selaras dengan pemikiran di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA DALAM KEGIATAN KARANG TARUNA KARYA ABADI DI DESA JEPANG KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS”**, dengan alasan sebagai berikut.

1. Seiring perubahan global dengan keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia diperlukan untuk menyiapkan generasi muda yang demokratis yang bermutu dan

professional agar mereka memiliki karakter daya tahan yang kokoh di tengah-tengah konflik peradaban.

2. Dalam era reformasi banyak menuntut sebuah transparansi, diperlukan adanya penerapan nilai-nilai demokrasi utamanya nilai Demokrasi Pancasila, sehingga warga negara khususnya generasi muda dapat berpikir dan bertindak yang benar sesuai dengan prinsip Demokrasi Pancasila, misalnya implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna dalam bidang keorganisasian dan pengembangan SDM, bidang ekonomi dan koperasi, bidang humas dan pengembangan komunikasi, bidang kesejahteraan sosial, bidang lingkungan hidup dan pariwisata, bidang olahraga dan seni, serta bidang kerohanian dan mental.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang hendak di dalami adalah.

1. Bagaimanakah implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kudus ?
2. Apakah faktor pendorong implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kudus ?

3. Apakah faktor penghambat implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kudus ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kudus.
2. Mengetahui faktor pendorong implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kudus.
3. Mengetahui faktor penghambat implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kudus.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah sumbangan pemikiran ilmiah mengenai implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna menurut teori Rochmadi.
  - b. Menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang terkait.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Karang Taruna

Hasil penelitian ini dijadikan masukan bagi Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang kecamatan Mejobo Kudus sebagai bahan dalam pelaksanaan implementasi demokrasi Pancasila khususnya dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi.

### b. Bagi Anggota Karang Taruna

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan bagi anggota Karang Taruna ketika menghadapi sebuah permasalahan dikalangan organisasi kemasyarakatan harus menanamkan nilai demokrasi Pancasila.

### c. Bagi Pihak Kelurahan

Memberikan masukan bagi pihak Kelurahan untuk mendukung pelaksanaan nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna.

## **E. PENEGASAN ISTILAH**

Penegasan istilah dimaksudkan untuk menghindari timbulnya salah penafsiran pada penelitian ini, sehingga dapat diperoleh persepsi dan pemahaman yang jelas. Oleh sebab itu peneliti menegaskan istilah-istilah berikut :

### 1. Implementasi Nilai

Implementasi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan, penerapan, yaitu untuk mencari bentuk tentang hal yang telah disepakati terlebih dahulu (2005:427).

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah “*Put something into effect*”, (penerapan, sesuatu yang memberikan efek atau dampak) (Mulyasa, 2006:93).

Nilai merupakan patokan, ukuran maupun kualitas akan sesuatu, sehingga sesuatu itu dinyatakan baik-buruk, indah-jelek, berguna-tidak berguna, benar-salah. Menurut Alport ( Mulyana, 2004 : 9 ), Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Nilai terjadi dalam wilayah yang disebut dengan keyakinan.

Jadi dapat diartikan bahwa implementasi nilai adalah penerapan keyakinan seseorang untuk dapat bertindak atas dasar pilihannya. Implementasi nilai berarti memberikan penerapan nilai-nilai dasar kehidupan yang menjadi keyakinan ataupun pilihan seseorang dalam bertindak, kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Demokrasi Pancasila

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* berarti “rakyat”, *kratos* memiliki arti “kekuasaan” atau “pemerintahan” (Zamroni, 2013 : 3). Demokrasi menurut Abraham Lincoln (dalam Suyahmo, 2014 : 1) adalah pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dari rakyat, yang

artinya pemerintahan itu asal mulanya dari rakyat lewat persetujuan bersama, lewat kontrak sosial.

Menurut Poerwodarminto (dalam Rochmadi, 2012 : 25) demokrasi merupakan istilah politik, secara harfiah berarti pemerintahan rakyat, (bentuk) pemerintahan negara yang segenap rakyat serta pemerintahan dengan perantara wakil-wakilnya. Demokrasi yang dihayati oleh masyarakat Indonesia bukanlah tiruan demokrasi bangsa lain, melainkan lahir dari nilai-nilai luhur budaya Indonesia itu sendiri.

Pancasila dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara, Pancasila artinya lima dasar, yang dimaksud adalah suatu dasar negara yang terdiri atas lima unsur yang menjadi satu kesatuan dasar filsafat Negara Republik Indonesia (Bakry, 2010 : 18). Pancasila yang dimaksud adalah : 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila merupakan perwujudan dari sila ke-4 dalam Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” (Hazairin, 1990 : 13). Demokrasi Pancasila merupakan kristalisasi dari Pancasila sila ke-4 yang biasanya digunakan dalam suatu organisasi untuk musyawarah dalam mencapai mufakat.



### 3. Karang Taruna

Karang Taruna menurut PERMENSOS nomor : 83/HUK/2005 adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan rakyat (Mulyawan, 2009 :2). Melalui Karang Taruna berbagai macam pendapat dan kreativitas dapat disalurkan. Tugas pokok dan fungsi Karang Taruna adalah sebagai wahana pengembangan generasi muda (termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan remaja) (Mulyawan, 2009 : 4-5).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Implementai Nilai**

##### **1. Pengertian Nilai**

Secara etimologi nilai berasal dari kata *value* (Inggris), yang berasal dari kata *valere* (Latin) yang berarti kuat, baik, berharga. Secara sederhana, nilai (*value*) adalah sesuatu yang berguna. Berbicara tentang nilai hal pertama yang terpikir adalah masalah baik dan buruk, indah dan jelek, pantas dan tidak pantas dan lain sebagainya. Nilai erat kaitannya dengan kegiatan penilaian (menilai) karena di dalam nilai terdapat cita-cita dan harapan akan kondisi ideal terhadap suatu hal.

Penilaian (menilai) yaitu kegiatan manusia dalam menimbang, mengukur, manakar, menyukat sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan itu dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, indah atau tidak indah, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius (Widjaja, 2000:5).

Menurut Alport ( Mulyana, 2004 : 9 ), nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Nilai terjadi dalam wilayah yang disebut dengan keyakinan. Seperti ahli psikologi pada umumnya, keyakinan ditempatkan sebagai wilayah psikologis yang lebih tinggi dari wilayah lainnya seperti hasrat, motif, sikap, keinginan, dan kebutuhan.

Nilai sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri berikut yaitu nilai berkaitan dengan subyek, kalau tidak ada subyek yang menilai maka tidak ada nilai juga. Nilai tampil dalam suatu konteks praktis, dimana subyek ingin membuat sesuatu. Nilai menyangkut sifat-sifat yang ingin ditambah oleh subyek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh obyek.

Menurut Moedjanto (dalam Wahana, 2005 : 67) Nilai tidak hanya tampak sebagai nilai bagi seseorang saja, melainkan bagi segala umat manusia. Nilai tampil sebagai sesuatu yang patut dikejar dan dilaksanakan oleh semua orang. Oleh karena itu, nilai dapat dikomunikasikan kepada orang lain.

Ada berbagai nilai. Semua nilai tidak sama inti dan artinya, ada nilai biologis, nilai psikologis, nilai estetis, nilai intelektual, nilai kerohanian, dan nilai keagamaan. Walaupun nilai-nilai tersebut berbeda, ada suatu susunan obyektif yang bersifat hierarkis. Prinsip penyusunan ini adalah kesatuan dan keharmonisan person yang integral serta dinamis (Moedjanto dalam Wahana, 2005 : 67). Sedangkan menurut strukturnya, secara hierarkis nilai-nilai dapat dibedakan sebagai berikut: nilai fisis-kemis, nilai biotis, nilai psikis, dan nilai khas human yang di dalamnya termuat antara lain nilai intelektual dan nilai religius (Wahana, 2005 : 67).

## **2. Fungsi Nilai Bagi Kehidupan Manusia**

Dalam kehidupan masyarakat selalu terdapat nilai yang menjadi patokan dalam bersikap dan berperilaku. Nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas yang menyangkut jenis dan minat (Winarno, 2009:3). Nilai dapat diartikan sebagai ukuran atas kehendak seseorang akan sesuatu hal yang menyangkut baik dan buruk. Nilai merupakan sesuatu yang kita alami sebagai ajakan dari panggilan yang kita hadapi, mendorong kita untuk melakukan sesuatu perbuatan, mengarahkan perhatian kita pada sesuatu yang menarik. Nilai tidak hanya tampak sebagai nilai bagi seseorang saja tetapi bagi seluruh manusia. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Winarno (2009:3) bahwa dalam nilai terdapat ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Suatu realitas abstrak
- 2) Bersifat normatif
- 3) Sebagai motivator (daya dorong) manusia dalam bertindak.

Dalam kesehariannya manusia senantiasa berinteraksi dengan hati, perasaan dan pikirannya. Ia mengetahui bahwa ada aturan berupa nilai yang harus ditaati, meskipun tidak terlihat bentuknya namun sangat terasa manfaatnya dalam kehidupan. Dengan adanya nilai tersebut, senantiasa terdapat perilaku yang sesuai dengan norma, serta memiliki daya dorong atau kemauan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dengan demikian nilai memiliki tempat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi penuntun dalam melaksanakan kehidupan

sehari-hari. Menurut Handoyo, dkk. (2007:30), fungsi nilai bagi kehidupan manusia adalah

- 1) Sebagai faktor pendorong, hal ini berkaitan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan cita-cita atau harapan.
- 2) Sebagai petunjuk arah, cara berpikir, berperasaan dan bertindak, serta panduan menentukan pilihan, sarana untuk menimbang penilaian masyarakat, penentu dalam memenuhi peran sosial, dan pengumpulan orang dalam suatu kelompok sosial.
- 3) Nilai dapat berfungsi sebagai alat pengawas dengan daya tekan dan pengikat tertentu. Nilai mendorong, menuntun dan kadang-kadang menekan individu untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan nilai yang bersangkutan. Nilai menimbulkan perasaan bersalah dan menyiksa bagi pelanggarnya.
- 4) Nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas.
- 5) Nilai dapat berfungsi sebagai benteng perlindungan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai memiliki bagian penting dalam kehidupan manusia, nilai berfungsi sebagai pedoman, patokan, ukuran dan arah tujuan bagi manusia dalam bertindak. Nilai itu berharga dan berguna bagi kehidupan manusia, nilai sama halnya dengan aturan. Dengan adanya aturan maka kehidupan lebih tertib dan terkendali, setiap manusia akan merasa memiliki tanggungjawab untuk bertindak sesuai dengan harapan masyarakat akan nilai tersebut. Nilai dapat juga berfungsi seperti hukum yang mengatur kehidupan manusia, karena sesungguhnya nilai itu ada karena adanya manusia, manusia itu sendiri yang menciptakan nilai, maka sudah seharusnya ia bersikap dan bertindak selaras seirama dan sejalan dengan nilai tersebut.

### 3. Macam-macam Nilai dan Tingkatannya

Notonagoro (dalam Suyahmo, 2012:212) menjelaskan hierarkhi nilai sebagai berikut :

- 1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia.
- 2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktivitas kehidupan.
- 3) Nilai kerohanian, yaitu segala yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dibagi lagi menjadi :
  - a) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (*ratio*, budi, cipta) manusia.
  - b) Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (*aesthetis*, *gevoel*, *rasa*) manusia.
  - c) Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (*will*, *wollwn*, *karsa*) manusia.
  - d) Nilai religius, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Sedangkan Walter G. Everet (Winarno, 2009 : 4), menggolongkan nilai-nilai manusiawai dalam delapan kelompok berikut.

- 1) Nilai-nilai ekonomis, ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli.
- 2) Nilai-nilai kejasmanian, membantu pada kesehatan, efisiensi, dan keindahan dari kehidupan badan.
- 3) Nilai-nilai hiburan, nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyeimbangkan pada pengayaan kehidupan.
- 4) Nilai-nilai sosial, berasal mula dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan.
- 5) Nilai-nilai watak, keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan.
- 6) Nilai-nilai estetis, nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni.
- 7) Nilai-nilai intelektual, nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran.
- 8) Nilai-nilai keagamaan.

Selain itu nilai dapat juga dibagi berdasarkan tingkatan tinggi rendahnya. Max Scheller membagi menjadi empat tingkatan sebagai berikut (Winarno, 2009 : 4-5).

- 1) Nilai-nilai kenikmatan  
Dalam tingkat ini terdapat deretan nilai yang mengenakan ataupun tidak mengenakan, yang menyebabkan orang senang atau tidak senang.
- 2) Nilai-nilai kehidupan  
Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan, seperti kesejahteraan, keadilan, kesegaran.
- 3) Nilai-nilai kejiwaan  
Dalam tingkatan ini terdapat nilai kejiwaan yang sama sekali tidak bergantung pada keadaan jasmani atau lingkungan. Contohnya keindahan, kebenaran, kebaikan dan pengetahuan murni.
- 4) Nilai-nilai kerohanian  
Dalam tingkatan ini terdapat modalitas nilai yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Nilai adalah ukuran. Nilai tersebut erat kaitannya dengan masyarakat dan sistem sosial. Nilai sosial merupakan suatu sikap, perasaan ataupun anggapan terhadap suatu hal mengenai baik buruk, benar salah, patut tidak patut yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

#### **4. Model-model Penanaman Nilai**

Nilai bukan ciptaan manusia, namun manusia dapat mewujudkan nilai. Sesuai dengan struktur hakiki yang ada dalam dirinya, manusia memperkembangkan aspek ekspresi, aspek sosialitas, serta aspek religiositasnya. Selain itu, nilai yang sungguh-sungguh diwujudkan secara konkret akan dapat memperkembangkan orang yang

bersangkutan. Perwujudan nilai tersebut dilakukan dalam kegiatan yang berhubungan dengan yang lain (Wahana, 2005 : 70).

Penanaman nilai bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan nilai kepada peserta didik, penanaman nilai juga bisa diterapkan pada generasi muda khususnya generasi muda Karang Taruna yang bertujuan untuk membantu mengetahui, memahami, dan menyadari akan nilai-nilai tersebut sehingga ia mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Penanaman nilai bukan hanya sekedar memberikan pendidikan nilai, akan tetapi bermuara pada terbentuknya pribadi yang unggul dan berkarakter. Penanaman nilai bukanlah sesuatu hal yang mudah, dibutuhkan strategi dan model penanaman yang tepat agar tujuan dari penanaman nilai tersebut dapat tercapai. Berkaitan dengan penanaman nilai yang bertujuan dalam pengembangan diri generasi muda Karang Taruna dapat dilakukan melalui implementasi nilai, seperti halnya implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna.

Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari penanaman nilai adalah terbentuknya pribadi yang berkarakter dengan budi pekerti luhur serta mampu bertanggungjawab terhadap pilihan dan keputusan yang telah diambilnya, sehingga untuk mewujudkannya, menurut Muslich (2014:175-176) strategi yang dapat dilakukan adalah melalui pengintegrasian dalam kegiatan sehari-hari (melalui keteladana atau contoh, teguran, kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan pengkondisian



lingkungan) dan pengintegrasian dalam kegiatan yang diprogramkan yaitu penanaman nilai dilakukan dengan perencanaan sistematis oleh pengurus Karang Taruna yang diintegrasikan dalam kegiatan Karang Taruna.

Menanamkan nilai pada diri seseorang tidaklah semudah menanam padi, melainkan sebuah proses yang sulit karena berkaitan perubahan dan pembentukan sikap maupun perilaku. Maka dalam penyampaian pun harus menggunakan metode atau cara-cara yang mudah diserap oleh seseorang itu sendiri. Menurut Paul Supardo, dkk dalam Zuriah (2011: 91-96) metode-metode penanaman nilai tersebut antara lain :

- a. Metode demokratis  
Metode ini menekankan pencarian dan penghayatan nilai-nilai yang langsung melibatkan anak tentunya dengan pendampingan dan pengarahan guru.
- b. Metode pencarian bersama  
Metode ini menekankan pencarian bersama nilai-nilai hidup dari masalah-masalah aktual dalam masyarakat yang melibatkan siswa dan guru.
- c. Metode siswa aktif  
Metode ini menekankan pada proses yang melibatkan anak sejak awal pembelajaran.
- d. Metode keteladanan  
Metode ini menempatkan pendidik atau guru sebagai idola dan panutan bagi anak.
- e. Metode *live in*  
Metode ini menekankan agar anak mempunyai pengalaman bersama orang lain secara langsung dalam situasi yang berbeda dari kehidupan sehari-harinya.
- f. Metode penjernihan nilai  
Metode ini dilakukan dengan dialog aktif dalam bentuk *sharing* atau diskusi mendalam dan intensif sebagai pendampingan agar anak tidak mengalami pembelokan nilai hidup.

## 5. Model Implementasi Nilai

Pada prinsipnya terdapat dua pemilihan model implementasi kebijakan. Pertama implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (*top-bottom*) versus dari “bawah ke atas” (*bottom-top*), dan pemilihan implementasi yang berpola paksa (*command-and-control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*) (Dwidjowijoto, 2004:165).

Model mekanisme paksa adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa di dalam negara di mana tidak ada mekanisme insentif bagi yang menjalani, namun ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan atau melanggarnya. Model mekanisme pasar adalah model yang mengedepankan mekanisme insentif bagi yang menjalani, dan bagi yang tidak mendapatkan sanksi, namun tidak mendapatkan insentif. Model “*top-down*” mudahnya berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, di mana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya “*bottom-up*” bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat (Dwidjowijoto, 2004:166-167).

Dari uraian di atas, maka model implementasi kebijakan pada prinsipnya ada dua pemilihan implementasi yaitu *top-bottom* versus *bottom-top* dan model mekanisme paksa dan mekanisme pasar.

Merilee S. Grindle (1980) dalam (Dwidjowijoto, 2004:174-175) menentukan isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b) jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c) derajat perubahan yang diinginkan.

- d) kedudukan pembuat kebijakan.
- e) siapa pelaksana program.
- f) sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

- a) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
- b) karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) kepatuhan dan daya tanggap.

Dari uraian di atas ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan juga dilakukan.

## **B. Demokrasi Pancasila**

### **1. Kedudukan Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia**

Bagi bangsa dan negara Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara, Pancasila artinya lima dasar, yang dimaksud adalah suatu dasar negara yang terdiri atas lima unsur yang menjadi satu kesatuan dasar filsafat Negara Republik Indonesia (Bakry, 2010 : 18). Pancasila yang dimaksud adalah : 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Perkembangan Pancasila itu pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama,

tahap perkembangan sebagai nilai yang mampu menggerakkan perjuangan bangsa dari zaman ke zaman. Hal ini sekaligus mewarnai sikap bangsa dalam berbagai bentuk dan ragam realisasinya. Dalam perkembangan ini Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedua, perkembangan Pancasila yang telah memiliki sifat formal yaitu semenjak disahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu nilai Pancasila tercantum dalam pembukaannya (Darmodiharjo, 1984 : 11).

Presiden Soeharto mengemukakan bahwa Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri (Dipoyudo, 1984 : 33).

Pancasila sebagai objek pembahasan ilmiah memiliki ruang lingkup yang sangat luas terutama berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Setiap kedudukan dan fungsi Pancasila pada hakikatnya memiliki makna serta memiliki aspek yang berbeda – beda. Menurut Kaelan (2003 : 107-112) kedudukan dan fungsi Pancasila dapat dipahami sebagai berikut :

- 1) Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa.

Sebagai petunjuk arah untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Menurut Darmodiharjo (dalam Kaelan 2003 : 108) dalam proses penjabaran kehidupan

modern antara pandangan hidup masyarakat dengan pandangan hidup bangsa memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Pandangan hidup bangsa di proyeksikan kembali kepada pandangan hidup masyarakat serta tercermin dalam sikap hidup pribadi warganya. Dengan demikian dalam negara Pancasila pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan negara yaitu pemerintah terikat oleh kewajiban konstitusional, yaitu kewajiban pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Pancasila sebagai pandangan hidup didalamnya terkandung dasar pemikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.

## 2) Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan

negara. Menurut Kaelan (2003 : 110) kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. dengan demikian Pancasila merupakan asas kerokhaniaan tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijemakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran.
  - b) Meliputi suasana kebatinan (*Geistlichenhintergrund*) dari Undang-Undang Dasar 1945.
  - c) Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
  - d) Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk para penyelenggara parta dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- 3) Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, dan bukan mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dengan kata lain unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan *kausa materialis* (asal bahan) Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri

negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia.

## **2. Pengertian Demokrasi dan Negara Demokrasi**

### **1) Pengertian Demokrasi**

Demokrasi menurut Abraham Lincoln (dalam Suyahmo, 2014 : 1) adalah pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dari rakyat, yang artinya pemerintahan itu asal mulanya dari rakyat lewat persetujuan bersama, lewat kontrak sosial. Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Soekarno (dalam Yudhatama, 2007 : 1) demokrasi adalah pemerintah rakyat, cara pemerintahan ini memberi hak kepada semua rakyat untuk memerintah.

Definisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (*kratein*) dari/oleh/untuk rakyat (*demos*). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyuarakan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara (Sumarsono, S dkk, 2005 : 19).

Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Menurut Maswadi Rauf (dalam Winarno, 2009 : 93) secara substansif, prinsip utama dalm demokrasi ada dua, yaitu :

- 1) Kebebasan/persamaan (*freedom/equality*)

## 2) Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*)

Menurut Suyahmo (2014 : 9) nilai dasar sebagai bentuk pencerminan dari demokrasi antara lain :

- 1) Kecintaan terhadap keterbukaan dan terbuka dalam berkomunikasi.
- 2) Menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia.
- 3) Percaya diri dan mengekang diri.
- 4) Kebersamaan.
- 5) Keseimbangan.
- 6) Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela.
- 7) Menjamin terjadinya perubahan secara damai.
- 8) Pergantian penguasa secara teratur.
- 9) Penggunaan paksaan sesedikit mungkin.
- 10) Menegakkan keadilan.
- 11) Komitmen dan tanggungjawab.
- 12) Kerjasama.
- 13) Toleransi / saling menghargai.
- 14) Bebas berpendapat dan menghormati kebebasan.
- 15) Memahami keanekaragaman.

Setiap bangsa memiliki ciri kehidupan demokrasi sendiri, sebagai pedoman hidup bernasyarakat dan berbangsa. Namun demikian demokrasi memiliki prinsip-prinsip universal, sebagai ukuran bahwa suatu bangsa atau negara menganut sistem demokrasi. Menurut Marzuki, (2014 : 5-6), prinsip-prinsip universal demokrasi itu adalah :

- a) Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
- b) Tingkat persamaan (kesetaraan) antara semua warga negara.
- c) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh para warga negara.
- d) Penghormatan terhadap supremasi hukum.
- e) Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang.
- f) Kedudukan yang sama didalam hukum.
- g) Terjaminnya kehidupan hak asasi manusia.



## 2) Negara Demokrasi

Setiap negara memiliki sistem demokrasinya tersendiri yang berbeda dengan negara lain. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Menurut Sumarsono, S dkk (2005 : 20), ada berbagai bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara, antara lain :

- a) Pemerintahan Monarki: monarki mutlak (absolut), monarki konstitusional, dan monarki parlementer.
- b) Pemerintahan Republik: berasal dari bahasa latin *Res* yang berarti pemerintahan dan *Publica* yang berarti rakyat. Dengan demikian pemerintahan republik dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak (rakyat).

Demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang lahir dan dipaparkan oleh para pemikir atau ilmuwan barat yang menekankan pada azas liberalisme dan individualisme. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang dilandasi pada prinsip musyawarah mufakat.

Suatu pemerintahan yang kuat dan stabil adalah pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Dukungan rakyat dapat diperoleh apabila rakyat dilibatkan dalam proses pelaksanaan pemerintahan secara demokratis. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Budaya demokrasi yang diterapkan di Indonesia hendaknya mengacu pada akar budaya nasionalisme.

Menurut Djahiri (dalam Rochmadi, 2012 : 25) menyebutkan bahwa demokrasi tidak hanya menyangkut bentuk dan sistem pemerintahan, tetapi juga menyangkut tentang cara hidup warga negara dalam

masyarakat dan bernegara. Istilah demokrasi tidak hanya dipergunakan dalam ruang lingkup pengertian pemerintahan atau politik, tetapi juga meliputi berbagai aspek kehidupan manusia.

Dalam masyarakat demokratis, komunikasi yang berwujud tuntutan sangat diperlukan, dan dianggap sangat penting. Hal ini dikarenakan tuntutan masyarakat tersebut merupakan dasar bagi negara dalam menentukan langkah dan pembangunan demi terwujudnya cita-cita bersama. Tuntutan masyarakat ini akan diolah oleh lembaga legislatif dan eksekutif sehingga menjadi suatu kebijakan yang harus diimplementasikan serta dievaluasi kebermaknaannya (Rochmadi, 2012 : 42).

Menurut Rusli Karim (dalam Rochmadi, 2012 : 43) dikatakan bahwa perilaku dan cirri-ciri orang yang memiliki kepribadian demokratis adalah inisiatif, disposisi, toleransi, cinta akan keterbukaan, komitmen, dan tanggungjawab serta memiliki kerja sama dalam keterhubungan.

### **3. Macam-macam Demokrasi dan Perkembangan di Indonesia**

Secara umum demokrasi yang dipakai dalam suatu negara sangat banyak macamnya, selain itu, demokrasi juga memiliki nilai-nilai. Menurut Zamroni (2013 : 108) nilai-nilai demokrasi, antara lain kebebasan, hak-hak individu, tujuan bersama, keadilan dan patriotisme. Sedangkan Menurut Suyahmo (2014 : 10-43) macam demokrasi menurut cara penyalurannya dapat dibedakan menjadi 2 :

- 1) Demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang secara langsung menerima dan menggunakan kehendak rakyat untuk menentukan kebijakan pemerintah.
- 2) Demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang mengatur sistem penyaluran aspirasi rakyat (pelaksanaan kedaulatan rakyat) melalui perwakilan atau lembaga-lembaga tertentu yang dibentuk berdasarkan suara rakyat.

Sedangkan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi dapat dibedakan menjadi 3:

- 1) Demokrasi Liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak individu suatu warga negara, artinya individu memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Pemerintah tidak banyak ikut campur dalam kehidupan bermasyarakat, yang artinya kekuasaan pemerintah terbatas.
- 2) Demokrasi Komunis, yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara, artinya pemerintah memiliki dominasi dalam demokrasi ini.
- 3) Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu demokrasi yang berdasarkan pada ideologi Pancasila.

Menurut Rochmadi, (2012 : 27-28) macam-macam demokrasi dapat dilihat dari 3 (tiga) jenis sudut pandang yaitu :

- 1) Demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
  - a) Demokrasi langsung, berarti paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam sistem permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara secara langsung.
  - b) Demokrasi tidak langsung, berarti paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapannya biasanya melalui pemilihan umum.
- 2) Demokrasi berdasarkan titik perhatian (tujuannya), dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.
  - a) Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, terdapat pada negara-negara liberal.
  - b) Demokrasi material adalah demokrasi yang dititik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi, sedangkan persamaan di bidang politik dihilangkan, terdapat pada negara-negara komunis.

- c) Demokrasi gabungan/campuran adalah demokrasi yang menggabungkan antara demokrasi formal dan material serta mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material.
- 3) Demokrasi berdasarkan paham ideologi, dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
  - a) Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal) adalah demokrasi yang didasarkan pada paham kebebasan dan individualisme. Karakter demokrasi konstitusional antara lain, kekuasaan pemerintahannya tidak diperkenankan terlalu ikut campur dalam permasalahan warga negaranya, dan kekuasaan pemerintahannya dibatasi konstitusi. Contoh negara yang menganut demokrasi konstitusional adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, serta negara-negara Eropa lainnya.
  - b) Demokrasi rakyat (demokrasi proletar) adalah demokrasi yang berpaham pada ajaran Marxisme-Leninisme-Komunisme yang mencita-citakan masyarakat tanpa kelas sosial dalam masyarakat. Contoh negara yang menganut demokrasi rakyat adalah RRC, Korea Utara, dan bekas negara Uni-Soviet.

Demokrasi menjadi sarana yang difungsikan untuk mencapai kepentingan rakyat yakni kesejahteraan bersama. Dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan*. Jelas sekali bahwa sila keempat Pancasila ini berbicara tentang Demokrasi. Pertama berbicara tentang kerakyatan. Kerakyatan disini mencakup segala sesuatu yang bersangkutan dengan kesejahteraan rakyat sebagai kepentingan bersama. Karena itu segala upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat, seperti kebijakan-kebijakan, baik politis, ekonomi, maupun budaya harus dipandu oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Sihotang, 2014 : 161). Itu berarti demokrasi yang terkandung dalam sila keempat bisa disebut dengan demokrasi Pancasila.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan berdasarkan perkembangan sejarah ke pemerintahan Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian.

Menurut Miriam Budiardjo, (2008 : 127) dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu :

- 1) Masa Republik Indonesia I (1945-1959), yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai, maka disebut dengan Demokrasi Parlementer.
- 2) Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
- 3) Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
- 4) Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.

Sedangkan menurut Rochmadi, (2012 : 37) pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi adalah sebagai berikut :

- 1) Awal kemerdekaan UUD 1945: 18 Agustus 1945-27 Desember 1949.
  - a) Berlakunya demokrasi dengan sistem presidensial, yaitu kekuasaan presiden sangat luas karena belum terbentuknya lembaga-lembaga negara.
  - b) Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, segala kekuasaan terletak pada KNIP.

- c) Pada 14 November 1945 terbentuk demokrasi dengan sistem parlementer sebagai awal tumbuhnya demokrasi liberal dengan sistem multi partai.
- 2) Konstitusi RIS 1949: 27 Desember-17 Agustus 1950.
    - a) Berlaku demokrasi dengan sistem parlementer dan kabinet parlementer semu (quasi parlementer), terjadi pengangkatan perdana menteri dan pembentukan kabinet, tetapi presiden masih ikut campur karena adanya mosi tidak percaya parlemen dalam kabinet.
  - 3) UUDS 1950: 17 Agustus 1950-5 Juli 1959.
    - a) Berlaku demokrasi dengan sistem parlementer (demokrasi liberal) dengan sistem multi partai, sekalipun amanat pembukaan UUD 1950 sesungguhnya menganut demokrasi Pancasila.
    - b) Sistem parlementer yang berlaku adalah sistem parlementer semu (quasi parlementer).
    - c) Sering terjadi pergantian kabinet akibat mosi tidak percaya dari parlemen (DPR) sehingga sejak berlakunya UUDS 1950 berlangsung terjadi pergantian cabinet sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu sebagai berikut.
      - (1) Kabinet Natsir: 6 September 1950-27 April 1951.
      - (2) Kabinet Sukiman: 27 April 1951-3 April 1952.
      - (3) Kabinet Wilopo: 3 April 1952-30 Juli 1953.
      - (4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I: 30 Juli 1953-12 Agustus 1955.
      - (5) Kabinet Burhanudin Harahap: 12 Agustus 1955-24 Maret 1956.
      - (6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II: 24 Maret 1956-9 April 1957.
      - (7) Kabinet kerja (Djuanda): 9 April 1957-10 Juli 1959.
    - d) Berlangsungnya pemilu legislatif pada 29 September 1955 dan 15 Desember 1955. Pemilu tersebut untuk memilih anggota konstituante yang berlangsung dengan pemilu multi partai dan sistem perwakilan berimbang (sistem proporsional). Pemilu tersebut menghasilkan

pemerintahan atau kabinet koalisi empat partai, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI.

#### **4. Demokrasi Pancasila dan Karakteristiknya**

##### **a. Demokrasi Pancasila**

Demokrasi yang dihayati bangsa Indonesia bukanlah tiruan demokrasi bangsa lain, melainkan lahir dari nilai-nilai luhur budaya dan suku-suku masyarakat bangsa Indonesia sendiri, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Para pendiri bangsa menetapkan bahwa dasar kehidupan demokrasi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia di kenal dengan istilah Demokrasi Pancasila.

Gagasan mengenai Demokrasi Pancasila tidak lepas dari pembicaraan para *founding fathers* pada sidang BPUPKI-PPKI tanggal 29 Mei s/d 18 Agustus 1945, terutama terkait dengan dasar falsafah Negara RI. Ketika sidang BPUPKI menyetujui konsep pemikiran Ir. Soekarno tentang Pancasila sebagai dasar falsafah Negara RI pada 1 Juni 1945, sejak saat itu sistem pemerintahan yang akan diterapkan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara merujuk pada demokrasi Pancasila.

Pembahasan terhadap Demokrasi Pancasila tidak lepas dari ideologi Pancasila itu sendiri. Ideologi Pancasila bukanlah ideologi dari seseorang atau sekelompok kecil bangsa Indonesia yang diperuntukkan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Demokrasi Pancasila

menunjuk pada bentuk sistem pemerintahan yang dicirikan oleh Pancasila dan diperuntukkan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Sistem pemerintahan yang dicirikan Demokrasi Pancasila, merupakan kependekan bagi sila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yakni sila keempat dalam Pancasila. Dengan demikian, sila keempat dijiwai dan diliputi sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan sila keempat menjiwai dan meliputi sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem pemerintahan seperti yang terjabar dalam sila keempat ini dinamakan “Demokrasi Pancasila”, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sedangkan yang menjadi pangkal tolak Demokrasi Pancasila ini adalah mengurus soal musyawarah untuk mufakat, yang menganut faham kekeluargaan dan faham kebersamaan.

Demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila. Sebutan Demokrasi Pancasila serta tata cara pelaksanaannya mulai digunakan secara resmi tahun 1968 melalui Tap.MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 tentang pedoman pelaksanaan Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berpedoman pada dasar negara Indonesia itu sendiri yaitu Pancasila.



Artinya, nilai-nilai demokrasi yang berlaku di Indonesia mengacu dan berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, nilai-nilai demokrasi Pancasila tidak hanya harus dihayati dan diamalkan sebagai bekal dalam hidup dan berkehidupan, tetapi juga harus dilestarikan kepada generasi penerus demi kelestarian kehidupan bangsa dan negara.

Berdasarkan kekonsistenan atas pengakuan Pancasila sebagai dasar negara RI, sebagai ideologi nasional Indonesia, dan sebagai sumber hukum dasar nasional Indonesia, maka sampai sekarang pun demokrasi yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu pemerintahan yang berasaskan atau bersendikan demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila secara integrasi sebagai landasannya. Corak khas Demokrasi Pancasila dapat dikenali dari sisi formal dan material. Dari sisi formal, Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat sedangkan dari sisi material, Demokrasi Pancasila menampakkan sifat kegotong royongan, yaitu suatu pencerminan dari kesadaran budi pekerti yang luhur sesuai dengan hati nurani manusia dalam sikap dan perilaku sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Perwujudan sikap tersebut antara lain menghargai orang lain, tolong menolong, ataupun mengutamakan kewajiban dari hak.

Konsep Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat, tetapi pemimpin tidak diberi hak untuk mengambil keputusan sendiri dalam hal “mufakat bulat” tidak tercapai. Secara teknis procedural upaya memberikan pengertian demokrasi bagi “Demokrasi Pancasila” sudah banyak dikemukakan. Pejabat presiden Soeharto pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967, antara lain menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Demokrasi Pancasila pada hakikatnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, bersatuan Indonesia dan bersama-sama menjiwei keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila dengan asas musyawarah mufakat pada hakikatnya merupakan prinsip dan nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila. Menurut Notonegoro (dalam Kaelan, 2002 : 40) falsafah Pancasila berarti suatu sistem pemikiran yang rasional, sistematis,

terdalam dan menyeluruh tentang hakikat bangsa, negara dan masyarakat Indonesia yang nilai-nilainya telah ada dan digali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga segala upaya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Demokrasi Pancasila terlebih dahulu harus diawali dengan proses pemahaman dan penghayatan falsafah negara ideologi Pancasila. Secara operasional, Demokrasi Pancasila senantiasa dijiwai dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

#### **b. Karakteristik Demokrasi Pancasila**

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Negara Republik Indonesia menganut cara pemerintahan yang demokratis, yaitu cara mengatur kehidupan negara yang didasarkan atas kepentingan rakyat, atau dengan kata lain pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Sejarah pelaksanaan demokrasi Pancasila baru dikenal sejak lahirnya orde baru. Bedanya demokrasi Pancasila dengan demokrasi lainnya adalah cara pemerintahan demokrasi Pancasila yang pelaksanaannya berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Kansil, 1986 : 51).

Menurut Marzuki (2014 : 7), ciri-ciri Demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :

- 1) Kedaulatan ada di tangan rakyat.
- 2) Berlandaskan kekeluargaan dan gotong-royong.
- 3) Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 4) Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
- 5) Menghargai hak asasi manusia.
- 6) Mendahulukan kepentingan rakyat dan kepentingan umum.
- 7) Kekuasaan kepala negara terbatas.

Sedangkan menurut Kansil (1986 : 51-52), ciri-ciri Demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan ini demokrasi Pancasila tidak mengenal yang kuat (yang memperoleh suara terbanyak) menekan yang lemah, yang besar menekan yang kecil. Dalam demokrasi Pancasila dikenal dengan cara permusyawaratan antara semua anggota keluarga besar bangsa Indonesia untuk mencapai mufakat guna mencapai tujuan dan kepentingan bersama.
- 2) Ciri lain dari demokrasi Pancasila adalah sistem perwakilan. Berbeda dengan sistem demokrasi lain, seperti di Amerika Serikat di mana rakyat secara langsung memilih presidennya.

Kedua ciri diatas menggambarkan pelaksanaan satu sila dalam Pancasila. Sila itu adalah sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sebagai sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang berfungsi sebagai dasar filsafat negara dan sumber tertib hukum Indonesia, maka demokrasi Pancasila harus dibina dan ditegakkan oleh seluruh aparatur negara Republik Indonesia, khususnya oleh penguasa dan petugas penegak hukum dan penegak negara (Purbopranoto, 1982 : 135).

## **5. Nilai-nilai Demokrasi Pancasila**

Nilai-nilai Demokrasi Pancasila telah dijelaskan dengan tegas dan terperinci dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Akan tetapi, karena sifat dari Pancasila yang hierarki piramidal, maka nilai-nilai yang terurai dalam sila keempat tersebut harus sesuai dan selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila yang lain. Dengan

menggunakan kalimat lain, nilai-nilai Demokrasi Pancasila seperti yang ada dalam sila keempat Pancasila yang meliputi dan diliputi oleh nilai sila-sila lainnya.

Menurut Rochmadi (2012 : 36), nilai-nilai Demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.
- 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- 6) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi , atau golongan.
- 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Pada dasarnya nilai demokrasi yang paling hakiki adalah bahwa aspirasi rakyat menjadi titik sentral dalam kehidupan masyarakat .demikian halnya dalam demokrasi Pancasila, aspirasi dan kepentingan rakyat merupakan acuan di dalam hidup dan kehidupan. Ini berarti bahwa kepentingan rakyat adalah merupakan titik sentral dalam berpikir, berbuat dan bertindak.

Keterkaitan prinsip-prinsip demokrasi dengan Demokrasi Pancasila pada dasarnya lebih banyak berbicara tentang masalah praktis landasan ideology dan filosofis. Pelaksanaan demokrasi secara umum didasarkan pada landasan filosofis individualistic, sedangkan pelaksanaan demokrasi yang berlaku di Indonesia (Demokrasi Pancasila) mengacu dan berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam silai-sila Pancasila yang sifatnya hierarki piramidal. Misalnya, dalam menyampaikan pendapat, ide, gagasan, atau kritik akan dijamin kebebasannya, tetapi dengan ketentuan atau cara-cara penyampaiannya hendaknya berpegang teguh kepada nilai-nilai moral bangsa seperti penghormatan kepada orang lain dan santun.

### **C. Karang Taruna**

#### **1. Pengertian Karang Taruna**

Pengembangan kualitas, keterampilan, kepribadian dan kecakapan hidup kepribadian generasi muda jelas tidak bisa dicapai hanya dengan mengikuti pendidikan formal, tetapi dapat dilakukan melalui wadah (lembaga atau organisasi) yang mempunyai komitmen terhadap pengembangan generasi muda tersebut. Peran serta organisasi kepemudaan sebagai salah satu komponen partisipasi sosial masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan karena organisasi tersebut mitra potensial pemerintah dalam upaya mengurangi dan memecahkan masalah-masalah sosial. Organisasi lokal sebagai sumber daya potensial

dituntut untuk berperan secara optimal untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan. Organisasi lokal di lingkungan desa/kelurahan merupakan wadah untuk memenuhi kebutuhan ataupun memecahkan permasalahan masyarakat.

Salah satu organisasi lokal yang ada di hampir setiap desa atau kelurahan adalah Karang Taruna sebagai tempat atau wadah pembinaan generasi muda. Karang Taruna merupakan wadah bagi generasi muda (baik siswa, mahasiswa) untuk berorganisasi sejak dini. Melalui Karang Taruna berbagai macam pendapat dan kreativitas dapat disalurkan. Tugas pokok dan fungsi Karang Taruna adalah sebagai wahana pengembangan generasi muda (termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan remaja) (Mulyawan, 2009 : 4-5).

## **2. Karang Taruna Sebagai Organisasi Kepemudaan**

Dalam perkembangannya, organisasi telah menjadi semakin modern dan kompleks. Berbagai faktor telah mempengaruhinya, sehingga membutuhkan perhatian tersendiri dari para pelaku organisasi agar dapat menyikapi dengan bijaksana. Menurut Hasibuan (2003 : 24) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Robbins (dalam Umar, 2003 : 15-16), permasalahan pokok dalam perilaku keorganisasian dapat dibagi dua.

1) Permasalahan pokok individu dalam organisasi, misalnya :

- a) Karakteristik biografis, seperti : usia, jenis kelamin, status keluarga, dan masa kerja.
  - b) Kemampuan intelektual dan kesehatan fisik.
  - c) Kepribadian, seperti : kesadaran diri dan sikap berbudaya.
  - d) Belajar
  - e) Persepsi dan inisiatif dalam pengambilan keputusan.
  - f) Nilai, sikap, dan keputusan kerja.
  - g) Motivasi.
- 2) Permasalahan pokok kelompok dalam organisasi, misalnya :
- a) Interaksi kelompok.
  - b) Perilaku kelompok.
  - c) Sumber daya anggota kelompok.
  - d) Struktur kelompok
  - e) Kondisi eksternal kelompok.
  - f) Proses kelompok.
  - g) Tugas kelompok.
  - h) Pengambilan keputusan kelompok.
  - i) Tim kerja.
  - j) Komunikasi.
  - k) Kepemimpinan.
  - l) Keleluasaan dan politik.
  - m) Konflik, perundingan, dan perilaku antar kelompok.

Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Organisasi Karang Taruna adalah organisasi yang berada di lingkungan penduduk dalam lingkup satu Rukun Tetangga atau Rukun Warga, yang pengurusnya terdiri dari para pemuda/pemudi yang berada di lingkungan itu. Organisasi Karang Taruna merupakan wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya termasuk di dalamnya yaitu pemberdayaan remaja itu sendiri. Melalui Karang Taruna berbagai macam pendapat dan kreativitas dapat disalurkan, karena generasi muda merupakan agen perubahan di masa mendatang yang harus dilatih agar berani mengemukakan pendapat dan mempertahankan pendapatnya di depan umum, serta menghormati pendapat orang lain sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila.



Menurut Sugiyarto (2010:68-72) kaum muda memiliki potensi penting yaitu :

- 1) Jumlah yang besar dan tersebar di mana-mana.  
Potensi jumlah yang besar, haruslah disatukan menjadi kekuatan besar, untuk merebut masa depan bangsa yang lebih baik, kuat dan menyejahterakan bangsa.
- 2) Potensi sumber daya manusia yang terdidik juga melimpah.  
Dari jumlah yang besar tersebut, kaum muda kini banyak yang masuk kategori terdidik, disektor pendidikan jelas semua diisi oleh kaum muda. Sebagian dari mereka yang kini merintis karir di OKP (organisasi-organisasi kepemudaan), ORMAS (organisasi sosial kemasyarakatan), hingga PARPOL (partai politik).
- 3) Potensi hubungan dan jaringan yang luas  
Selain potensi jumlah, lebih terdidik, dan penyebarannya dimana-mana, kaum muda berikut pengalamannya dalam berbagai segmen organisasi juga patut dipertimbangkan.
- 4) Potensi komitmen yang teruji  
Hingga saat ini bagaimanapun eksistensi NKRI tidak lepas dari peran perjuangan dan kiprah kaum muda.
- 5) Potensi sebagai agen perubahan  
Siapaapun akan mengakui, bahwa kaum muda merupakan asset penting bangsa. Ia sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*), dan pemegang kebijakan masa depan.

Banyak di antara tokoh-tokoh pergerakan dan pejuang bangsa pada masa lalu berasal dari kalangan pemuda. Dua tokoh proklamator bangsa, Soekarno-Hatta, memimpin bangsa saat masih muda. Demikian halnya sederet tokoh-tokoh pemuda lainnya. Karena banyak potensi yang dimiliki kaum pemuda seperti potensi umur yang dimiliki, tenaga yang masih kuat, dan gagasan yang kreatif maka, potensi itu harus dikelola dengan baik agar pemuda dapat berjalan terarah, layaknya saat kita mengendarai sebuah mobil balap yang siap melaju kencang ke tempat tujuan. Melalui Karang Taruna itulah generasi muda dapat belajar untuk

menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu para generasi muda harus diarahkan agar tetap melaju di jalan kemajuan bangsa.

### **3. Tujuan dan Program Kerja Karang Taruna**

Salah satu syarat berhasilnya program Karang Taruna adalah adanya pemahaman dan peran semua pihak yang berkaitan dengan program tersebut. Pihak yang dimaksud adalah para Pembina dan para pemangku kepentingan mulai dari Pembina umum, fungsional, dan teknis baik di pusat maupun di daerah, lembaga swasta organisasi sosial, masyarakat serta Karang Taruna itu sendiri. Dalam pedoman dasar Karang Taruna (Mulyawan, 2009 : 3-4) tujuan dari Karang Taruna adalah

:

- 1) Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi, berbagai masalah sosial.
- 2) Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.
- 3) Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna.
- 4) Termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Terjalinnnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- 6) Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya

sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.

- 7) Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Selain itu Karang Taruna juga memiliki beberapa program kerja

antara lain :

- 1) Bidang keorganisasian dan pengembangan SDM.
- 2) Bidang ekonomi dan koperasi.
- 3) Bidang humas dan pengembangan komunikasi.
- 4) Bidang kesejahteraan sosial.
- 5) Bidang lingkungan hidup dan pariwisata.
- 6) Bidang pengembangan olahraga dan seni budaya.
- 7) Bidang kerohanian pembinaan mental.

#### **4. Fungsi Karang Taruna dalam Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Indonesia**

Organisasi pemuda Karang Taruna merupakan tulang punggung untuk kemajuan desa, karena dalam Karang Taruna memiliki modal untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian, terutama dibidang kesejahteraan sosial. Melalui Karang Taruna para generasi muda dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, dengan melaksanakan fungsi dari Karang Taruna itu sendiri. Adapun menurut pedoman Karang Taruna (Mulyawan, 2009 : 4-5) Fungsi dari Karang Taruna adalah :

- 1) Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial.

- 2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
- 3) Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.
- 4) Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
- 5) Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
- 6) Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan local dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7) Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif, dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.
- 8) Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 9) Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi, dan kemitraan, dengan berbagai sektor lainnya.
- 10) Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

## **5. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Kegiatan Karang Taruna**

Setiap warga negara perlu memahami bahwa musyawarah mufakat dapat memperkuat tali silaturahmi dan memperkokoh pondasi NKRI berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, baik secara langsung maupun perwakilan. Secara garis besar penyelenggaraan pemerintah berada di tangan rakyat berdasarkan konstitusi UUD 1945. Pelaksanaan

demokrasi Pancasila bukan hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan pada permusyawaratan yang mencakup kebebasan dan kebersamaan.

Menurut Sulaeman, (2010: 172) yaitu:

Kata-kata kuncinya adalah kebersamaan, demokrasi berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat serta semangat gotong-royong dalam memajukan kehidupan bersama. Apabila musyawarah, mufakat, dan gotong-royong berjalan dengan baik, akan terwujudlah tatanan demokrasi.

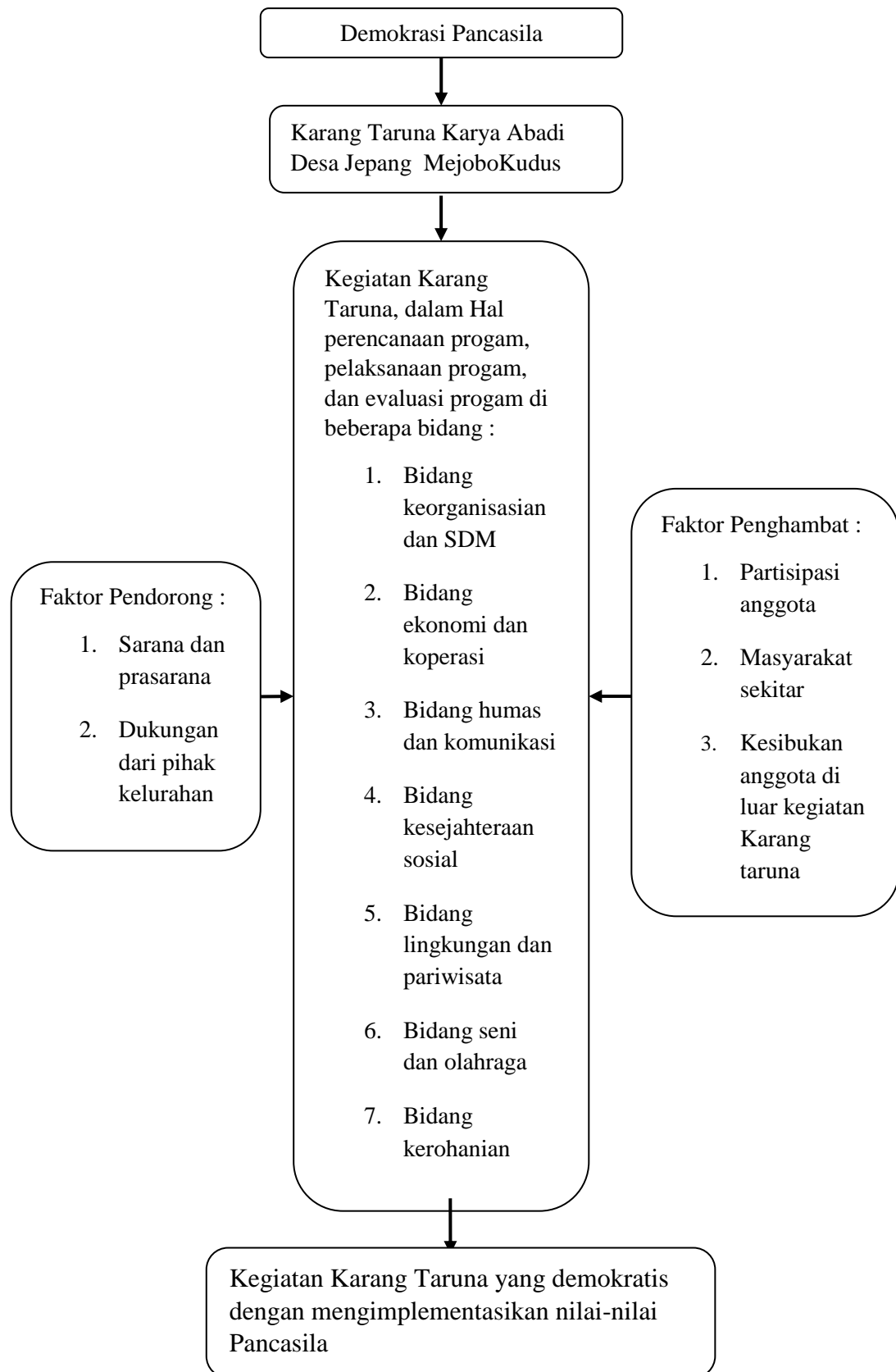
Musyawarah merupakan kegiatan dalam pengambilan keputusan pada suatu forum dan agenda yang akan dilaksanakan bersama secara mufakat. Pelaksanaan musyawarah mufakat juga tercermin dalam kegiatan Karang Taruna. Organisasi beranggotakan pemuda ini, sering mengadakan rapat rutin untuk membahas rencana program kerja atau suatu kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakannya nilai demokrasi Pancasila pada setiap kegiatan Karang Taruna.

#### **D. KERANGKA BERPIKIR**

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara terjamin (MD, 2000 : 19). Demokrasi bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang tidak baru. Sebagai generasi muda harus menanamkan sikap demokrasi dalam kegiatan sehari – hari, terutama dalam melakukan suatu kegiatan organisasi, misalnya saja dilingkungan masyarakat ada organisasi Karang Taruna. Dalam melakukan suatu kegiatan organisasi, yaitu organisasi masyarakat yang tidak lain adalah Karang Taruna perlu ditanamkan nilai-nilai demokrasi, khususnya Demokrasi Pancasila.

Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Wursanto, 2002 : 71).

Oleh karena itu dalam melakukan suatu kegiatan, khususnya kegiatan Karang Taruna perlu ditanamkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam hal perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program, yaitu di beberapa bidang kegiatan Karang Taruna agar dalam melakukan suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar terutama jika terjadi permasalahan dalam kegiatan tersebut. Misalnya saja dalam melaksanakan kerja bakti harus ditanamkan sikap kegotong-royongan. Dengan adanya penerapan nilai Demokrasi Pancasila, maka setiap kali ada permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah sesuai dengan nilai Pancasila sila ke 4 dalam Pancasila.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Dasar Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005 :6). Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002 : 3) mendefinisikan “metode kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian sangat penting dalam rangka pertanggungjawaban data penelitian yang diperoleh. Oleh karena itu lokasi dalam penelitian ini adalah Karang Taruna Karya Abadi desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang beralamatkan di Jalan Suryokusumo, RT 02 RW 07. Alasan mengapa memilih lokasi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna, karena pada kenyataannya masih banyak



sikap dan perilaku anggota Karang Taruna yang belum mencerminkan nilai demokrasi Pancasila itu sendiri.

### **C. Fokus Penelitian**

Penetapan fokus penelitian dilakukan peneliti agar dalam membuat keputusan tentang data yang diperoleh. Fokus dalam penelitian ini adalah, implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo KabupatenKudus, dimana penelitian ini difokuskan pada :

- a. Implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo KabupatenKudus, meliputi :
  - 1) Perencanaan progam kegiatan Karang Taruna.
  - 2) Wujud pelaksanaan progam kegiatan Karang Taruna.
  - 3) Evaluasi progam kegiatan Karang Taruna.
  - 4) Tata cara pergaulan dalam kegiatan Karang Taruna.
- b. Faktor pendorong dalam implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo kabupatenKudus, meliputi :
  - 1) Sarana dan prasarana.
  - 2) Dukungan dari pihak kelurahan.
- c. Faktor penghambat dalamimplementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan MejoboKudus, meliputi :

- 1) Partisipasi anggota.
- 2) Masyarakat sekitar.
- 3) Kesibukan anggota di luar kegiatan Karang Taruna.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data utama dan sumber data tambahan. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2002 : 112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

##### **a. Sumber data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung dan mendalam di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung di Karang Taruna Karya Abadi desa Jepang Mejobo Kudus oleh peneliti. Selain itu juga dengan melakukan wawancara dengan kepala desa Jepang, ketua Karang Taruna dan anggota Karang Taruna itu sendiri.

##### **b. Sumber data sekunder**

Data sekunder merupakan data tambahan sebagai pendukung data primer. Data sekunder ini berasal dari dokumen tertulis, seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, jurnal, buletin, majalah ilmiah, laporan penelitian dan dokumen resmi.

## E. Metode Pengumpulan Data

Mendukung terselesaikannya penelitian ini maka perlu diadakan pengumpulan data, untuk memperoleh data yang baik, akurat, dan valid, sehingga membutuhkan teknik pengumpulan data yang relevan sehingga tidak terjadi kekeliruan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah :

### a. Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk mengamati sesuatu, seseorang, suatu lingkungan, atau situasi secara tajam terinci, dan mencatatnya secara akurat dalam beberapa cara (Rohidi, 2011 : 182). Sedangkan menurut Maman Rachman (1993:77), observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- 1) Pengamatan Langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap objek ditempat kejadian atau berlangsungnya peristiwa.
- 2) Pengamatan Tidak Langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa.

Peneliti mengadakan pengamatan langsung di Karang Taruna Karya Abadi Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kudus. Pelaksanaan observasi dimulai pada tanggal 13 Juli s/d 25 Agustus 2015.

## b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002 : 135). Pengambilan data melalui wawancara dilakukan secara langsung kepada responden dan informan pada saat pengamatan langsung atau observasi partisipan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara akan berhasil jika orang atau tokoh yang diwawancarai bersedia dan dapat menuturkan dengan kata – kata (Rohidi, 2011 : 208).

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Jepang, anggota Karang Taruna, dan masyarakat sekitar, dengan menggunakan teknik wawancara yang akrab, sopan, santun, dan ramah, harapannya mampu mengambil informasi secara mendalam berkaitan dengan implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data melalui bukti tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Rachman, 1993 : 96 ). Metode dokumentasi dilakukan dengan cara peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang ada di Karang Taruna Karya Abadi berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen tentang kegiatan Karang Taruna, foto-foto kegiatandan lain sebagainya.

## F. Validitas Data

Validitas data yang diharapkan dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi dengan teknik pemeriksa data. Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2002:178).

Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber data, berarti menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik pemeriksaan data ini memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau membandingkan triangulasi dengan sumber data dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, pejabat pemerintah.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Bogdan (dalam Rachman, 2011 : 173) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu:

##### **a. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.

#### b. Reduksi Data

Reduksi Data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kemudian dicari temanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah penelitian untuk mencarinya apabila sewaktu-waktu diperlukan.

#### c. Penyajian Data

Penyajian Data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

#### d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data Disajikan

Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi dan sajian yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

### **H. Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu :

#### 1. Tahap Pra Penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan skripsi, membuat instrumen penelitian dan surat izin penelitian.

## 2. Tahap Penelitian

- a. Pelaksanaan penelitian, yaitu peneliti mengadakan observasi terlebih dahulu di Karang Taruna Karya Abadi desa Jepang Mejobo Kudus.
- b. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan tidak langsung tentang implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi desa Jepang Mejobo Kudus, yaitu melakukan pengamatan, wawancara dengan responden, mengambil data, dan mengambil foto yang akan digunakan sebagai dokumentasi penunjang serta sebagai bukti penelitian.
- c. Kajian pustaka yaitu melakukan pengumpulan data dari informasi dan buku-buku pendukung penelitian.

## 3. Tahap Pasca Penelitian

Pada tahap ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk di analisis kemudian mendeskripsikan mengenai implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi desa Jepang Mejobo Kudus.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Lokasi Penelitian**

###### **a. Keadaan geografis wilayah desa Jepang**

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang beralamatkan di jalan Suryokusumo, RT 02 RW 07. Desa Jepang merupakan salah satu desa di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan jarak tempuh dari pusat pemerintahan kecamatan 1,8 km, dan jarak dari ibu kota kabupaten adalah 4 km. Desa Jepang secara administrative di bagi menjadi 3 (tiga) dusun, 12 RW, dan 56 RT. Luas wilayah desa Jepang adalah 338.729 Ha. Luas lahan yang ada dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain-lain.

Bila dilihat secara geografisnya letak desa Jepang adalah sebagai berikut :

###### **1) Kondisi Geografis Desa Jepang**

Topografi	: dataran rendah
Suhu udara rata-rata	: 31 - 35° Celcius
Jumlah bulan hujan	: 6 bulan

2) Batas-batas Wilayah Desa

- a) Sebelah Utara : Desa Megawon
- b) Sebelah Selatan : Desa Payaman dan Desa Gulang
- c) Sebelah Barat : Desa Jepang Pakis
- d) Sebelah Timur : Desa Mejobo dan Desa Kirig

3) Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan)

- a) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 1.8 Km
- b) Jarak dari pusat pemerintahan kota : 4 Km
- c) Jarak dari kota/ibukota kabupaten : 4 Km
- d) Jarak dari ibukota provinsi : 54 Km
- e) Kendaraan umum ke kabupaten terdekat : Angkudes

**b. Keadaan Demografis Wilayah Desa Jepang**

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Jepang menurut catatan akhir sejumlah 11.679 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.824 orang dan perempuan 5.855 orang dengan jumlah Kepala Keluarga 3.744 KK.

2) Pendidikan Penduduk Desa Jepang

Pendidikan merupakan suatu yang mutlak dan harus dimiliki oleh setiap orang. Pendidikan yang baik menjadikan pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar. Pendidikan merupakan salah satu unsur atau sarana di dalam memajukan kecerdasan bangsa dan negara. Pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu usaha yang sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan baik di dalam maupun di

luar sekolah, dan hal ini berlangsung seumur hidup. Tingkat pendidikan di wilayah Desa Jepang ditunjukkan dengan data sebagai berikut: (1) Taman Kanak-kanak 767 orang, (2) Sekolah Dasar/ sederajat 3.488 orang, (3) SMP 2.055 orang, (4) SMA/SMU 2.555 orang, (5) Akademi/D1-D3 10 orang, (6) Sarjana 90 orang, dan (7) Pascasarjana 5 orang.

### 3) Agama

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu jalan pembinaan mental spiritual agar tercapai apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini disadari dengan baik oleh masyarakat di wilayah Desa Jepang yang dapat hidup rukun di antara semua warga. Jumlah penduduk Desa Jepang menurut agama dapat dilihat dari data sebagai berikut : (1) Islam 11.679 orang, (2) Kristen 0, (3) Katholik 0, (4) Hindu 0, (5) Budha 0, (6) Konghucu 0.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Jepang semua beragama islam.

### **c. Keadaan Sosial Ekonomi Wilayah Desa Jepang**

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah Desa Jepang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau mencari nafkah dengan bermata pencaharian sebagai petani baik menjadi petani di sawahnya sendiri maupun sebagai buruh tani. Selain sebagai petani, masyarakat Desa Jepang mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja

di bidang: wiraswasta/pedagang, PNS, TNI/Polri, petani, buruh tani, pensiunan, peternak, jasa, pengrajin, dan pekerja seni, sebagaimana ditunjukkan dari data dibawah ini:

(1) Pegawai Negeri Sipil	: 75	orang
(2) TNI/Polri	: 21	orang
(3) Karyawan Swasta	: 1556	orang
(4) Wiraswasta/Pedagang	: 98	orang
(5) Petani	: 56	orang
(6) Buruh Tani	: 211	orang
(7) Pensiunan	: 60	orang
(8) Peternak	: 15	orang
(9) Jasa	: 36	orang
(10) Pengrajin	: 605	orang
(11) Pekerja Seni	: 10	orang

Dari data diatas jumlah total keseluruhan adalah 2743 orang yang sudah memiliki pekerjaan. Dapat dilihat bahwa mata pencaharian terbesar adalah karyawan swasta, jadi sebagian besar masyarakat di Desa Jepang sudah memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

#### **d. Karang Taruna di Desa Jepang**

Jumlah anggota keseluruhan Karang Taruna Karya abadi di Desa Jepang sebanyak  $\pm$  40 orang, yang anggotanya tersebar di 12 RW Desa Jepang. Dengan adanya penyebaran anggota di 12 RW maka, akan mewakili anggotanya di setiap RW tersebut dalam Karang Taruna Karya

Abadi di Desa Jepang. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Karya Abadi Desa Jepang antara lain :

- a) Memberikan pembinaan serta memantau secara langsung kegiatan Karang Taruna yang ada.
- b) Membentuk kader-kader Karang Taruna dan memberikan pembinaan kepada mereka, agar menjadi kader Karang Taruna yang terlatih dan terampil.
- c) Mengirimkan kader-kader Karang Taruna untuk mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh Karang Taruna di desa lain.

**e. Karang Taruna dalam Pembangunan Desa**

Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Dari hasil penelitian pada saat mengikuti kegiatan Karang Taruna Karya Abadi Desa Jepang pada tanggal 13 Juli 2015, pukul 19.00-22.00 WIB bertempat di aula Balai Desa Jepang, kegiatan pada waktu itu membahas tentang rancangan program kerja dan dana ADD (Alokasi Dana

Desa). Seperti yang disampaikan oleh ketua umum Karang Taruna Karya Abadi Muhammad Sholeh, S.Pd., sebagai berikut :

“yang dibahas dalam kegiatan hari ini adalah semua Pokja diharap membuat rancangan program kerja, sekaligus mempersiapkan perlombaan 17 Agustus dan acara perayaan air salamun yang diadakan setiap 1 tahun sekali sebagai rintisan desa pariwisata” (tanggal 13 Juli 2015).

Selain itu, dari hasil wawancara pada tanggal 13 Juli 2015 dengan bapak Bambang selaku ketua Karang Taruna periode 2011-2014, yang sekarang menjadi penasehat Karang Taruna Karya Abadi Desa Jepang, menyebutkan bahwa Karang Taruna mendapatkan dana alokasi atau anggaran dana sebanyak 4 juta dalam satu tahun.

Hal ini merupakan wujud dari pemanfaatan ADD (Alokasi Dana Desa) yang diperoleh desa setiap setahun sekali untuk dapat dimanfaatkan untuk kemajuan desa. Salah satunya adalah melalui program kerja yang ada dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi Desa Jepang, dimana semua program kerja itu diharapkan mampu memberikan pengalaman dan pendidikan baru terhadap semua anggota dalam Karang Taruna Karya Abadi Desa Jepang.

Secara lebih rinci, hasil penelitian tentang implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi akan dituangkan dalam matriks.

## **2. Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.**

Implementasi nilai merupakan suatu proses pelaksanaan atau penerapan ide yang memberikan dampak baik, berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi nilai berarti memberikan penerapan akan nilai-nilai dasar kehidupan yang menjadi keyakinan ataupun pilihan seseorang dalam bertindak, kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pengamatan dari hasil observasi yang penulis lakukan selama penelitian yaitu pada tanggal 26 Juli 2015, dalam proses kegiatan rapat yang berlangsung senantiasa menanamkan nilai demokrasi Pancasila seperti mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dapat dilihat juga ketika melakukan reorganisasi Karang Taruna pada tanggal 24 Februari 2015 saat pra penelitian di dalam forum tersebut sangat menghormati satu sama lain. Hal tersebut mengajarkan bahwa di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi, atau golongan.



Gambar 1. Reorganisasi Karang Taruna Karya Abadi  
(Sumber: dokumentasi pribadi, 24 Februari 2015)

Sedangkan hasil observasi pada tanggal 1 Agustus 2015, para remaja menghabiskan waktu sore untuk berlatih barong, yang dilaksanakan di depan balai desa Jepang. Kegiatan ini adalah kegiatan dibawah naungan Karang Taruna Karya Abadi dalam bidang seni dan olahraga. Hal tersebut diperkuat dengan hasil dokumentasi saat pelaksanaan kegiatan berlangsung, yaitu sebagai berikut.





Gambar 2. Remaja desa Jepang yang sedang berlatih kesenian Barong (Sumber: dokumentasi pribadi, 1 Agustus 2015)

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada tanggal 22 Agustus di setiap kegiatan Karang Taruna Karya Abadi sudah menanamkan nilai Demokrasi Pancasila yaitu ketika melaksanakan perlombaan memperingati hari kemerdekaan RI ke 70 selalu menghargai hak asasi manusia serta memiliki kedudukan hak, dan kewajiban yang sama, selain itu dalam bidang kerohanian saat melakukan pengajian adanya tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai Demokrasi Pancasila yang terimplementasi berpedoman pada nilai-nilai Demokrasi Pancasila yang sudah dikemukakan oleh Rochmadi (2012 : 36) sebagai berikut :

- a) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- b) Tidak memaksakan kehendak orang lain.

- c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- d) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.
- e) Itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- f) Keputusan yang diambil dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan, dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil observasi diatas, hampir dari semua kegiatan Karang Taruna Karya Abadi desa Jepang sudah menerapkan semua nilai-nilai Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diimplementasikan ketika melakukan rapat saat membahas sebuah kegiatan, maupun dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Mereka memperhatikan kedudukan, hak, dan kewajiban yang harus disamakan antar pengurus, menggunakan akal sehat dan hati nurani yang luhur dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melakukan permusyawaratan, seperti dalam melaksanakan perlombaan memperingati hari kemerdekaan yang ke 70, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2015. Kemudian dalam merencanakan berbagai macam progam-progam kerja atau pengambilan

keputusan, mereka selalu mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

**a. Implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus.**

**1) Perencanaan program kegiatan Karang Taruna**

Dalam melaksanakan kegiatan hal yang utama atau pokok adalah merencanakan program kegiatan. Sebelum merencanakan sebuah program kegiatan pasti ada musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil keputusan atas program kegiatan yang akan dilaksanakan. Ada beberapa program kegiatan yang ada di Karang Taruna yaitu :

- a) Bidang keorganisasian dan pengembangan SDM.
- b) Bidang ekonomi dan koperasi
- c) Bidang humas dan pengembangan komunikasi
- d) Bidang kesejahteraan sosial
- e) Bidang lingkungan hidup dan pariwisata
- f) Bidang pengembangan olahraga dan seni budaya
- g) Bidang kerohanian pembinaan mental

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis saat rapat lanjutan membahas acara di bulan Agustus pada tanggal 31 Juli 2015, menunjukkan sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi setiap

keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, yang keputusannya dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengamatan dari hasil observasi saat rapat membahas kegiatan Karang Taruna Karya Abadi telah menanamkan nilai demokrasi Pancasila itu sendiri, dimana dalam berlangsungnya rapat tersebut terjadi adanya musyawarah. Musyawarah itu sendiri menurut pengurus Karang Taruna Karya Abadi merupakan cara yang terbaik untuk mendapatkan sebuah keputusan terlepas ketika menuju mufakat dalam musyawarah, yang didalamnya terjadi silang pendapat, emosi yang kurang terkontrol karena mempertahankan sebuah pendapat. Hal tersebut diperkuat dengan adanya dokumentasi saat berlangsungnya rapat, sebagai berikut.



Gambar 3. Rapat persiapan perlombaan hari kemerdekaan Indonesia ke 70 (Sumber: dokumentasi pribadi diambil pada tanggal 31 Juli 2015).

## 2) Wujud pelaksanaan progam kegiatan Karang Taruna

Wujud pelaksanaan kegiatan Karang Taruna Karya Abadi berdasarkan hasil observasi dari pengamatan di beberapa bidang Karang Taruna telah menunjukkan sikap yang terkandung dalam nilai-nilai demokrasi Pancasila yaitu :

- a) Dalam bidang seni dan olahraga yaitu saling percaya kepada tim serta memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama saat melaksanakan olahraga voly
- b) Dalam bidang lingkungan hidup dan pariwisata adanya kegotong-royongan dalam melaksanakan kegiatan kerja bakti serta mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan kerja bakti, selain itu memiliki rasa itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- c) Dalam bidang kerohanian adanya tanggung jawab moral kepada Tuhan yang maha Esa saat melaksanakan pengajian
- d) Dalam bidang humas dan pengembangan komunikasi yaitu memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama serta menghargai hak asasi manusia saat pelaksanaan perlombaan memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke 70.

Kegiatan Karang Taruna tidak akan terwujud apabila didalam musyawarah tidak mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan

pribadi, atau golongan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Karena pelaksanaan kegiatan Karang Taruna terwujud tidak terlepas dari keaktifan anggota Karang Taruna Karya Abadi itu sendiri. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil dokumentasi saat pelaksanaan kegiatan berlangsung, yaitu sebagai berikut.



Gambar 4. Kegiatan perlombaan  
(Sumber: dokumentasi pribadi, 22 Agustus 2015)

Dari kegiatan perlombaan diatas dapat dilihat nilai demokrasi Pancasila yang muncul adalah memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama serta menghargai hak asasi manusia saat pelaksanaan perlombaan memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke 70.



Gambar 5. Kerja bakti bersama masyarakat sekitar  
(Sumber: dokumentasi pribadi, 2 Agustus 2015)

Dapat dilihat bahwa saat melaksanakan kerja bakti menggambarkan sikap kegotong-royongan serta mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan kerja bakti.



Gambar 6. Kegiatan olahraga voly  
(Sumber: dokumentasi pribadi, 6 September 2015)

Dapat dilihat bahwa saat melaksanakan olahraga voly menggambarkan saling percaya kepada tim, serta memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama saat melaksanakan olahraga voly.

### **3) Evaluasi program kegiatan Karang Taruna**

Setelah melaksanakan sebuah kegiatan, pasti ada evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi merupakan kegiatan atau proses untuk mengukur dan menilai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Evaluasi program kegiatan sendiri bertujuan untuk mengetahui tahapan manakah yang sudah dapat diselesaikan dan tahapan yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Implementasi nilai demokrasi Pancasila juga terdapat dalam evaluasi program kegiatan Karang Taruna Karya Abadi. Menurut hasil pengamatan pada tanggal 22 Agustus 2015, evaluasi dilakukan dengan musyawarah agar tidak terjadi konflik dalam evaluasi tersebut, serta menggunakan akal sehat serta hati nurani yang luhur dalam melakukan musyawarah. Keputusan hasil evaluasi dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

### **4) Tata cara pergaulan dalam kegiatan Karang Taruna**

Di dalam sebuah organisasi pasti ada tata cara pergaulan yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Tata cara pergaulan yang dimaksud disini adalah keaktifan para anggota Karang Taruna Karya Abadi desa Jepang, apakah saling menyapa satu sama lain dengan sesama anggotanya, dengan masyarakat sekitar dan apakah aktif dalam mengeluarkan pendapat



serta menyanggah pendapat orang lain di dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi.

Menurut hasil pengamatan penulis selama penelitian berlangsung banyak para anggota yang selalu menyapa dan berjabat tangan ketika bertemu dengan salah satu anggota Karang Taruna baik di dalam forum organisasi maupun diluar kegiatan organisasi itu sendiri, walaupun ada juga beberapa anggota yang masih pasif dengan alasan malu. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara salah satu anggota Karang Taruna Karya Abadi yang bernama Siti Aminah yang masuk dalam divisi ekonomi dan koperasi dalam kepengurusan Karang Taruna Karya Abadi, yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya saya tidak pasif akan tetapi saya takut salah dan malu apabila mengutarakan pendapat di depan umum”  
(wawancara pada tanggal 12 Agustus 2015).

Pada dasarnya tata cara pergaulan yang terdapat di dalam Karang Taruna Karya Abadi sudah mencerminkan salah satu nilai demokrasi Pancasila itu sendiri dimana setiap anggota mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di dalam pergaulan yang terdapat di Karang Taruna itu sendiri, walaupun dalam realitanya masih ada beberapa orang yang belum menggunakan haknya sebagai anggota, seperti mengeluarkan pendapatnya demi terlaksananya kegiatan Karang Taruna Karya Abadi.

**b. Faktor pendorong implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus.**

Implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi tidak lepas dari dukungan dan peran serta pihak kelurahan dan masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mendorong atau mendukung pelaksanaan Implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di desa Jepang dapat dilihat ketika melaksanakan kegiatan maupun rapat. Ketika pengurus Karang Taruna Karya Abadi melaksanakan rapat pihak kelurahan memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana berupa tempat yaitu di aula Balai Desa Jepang beserta tempat duduk/kursi untuk memperlancar kegiatan Karang Taruna tersebut. Sedangkan saat melaksanakan kegiatan Karang Taruna Karya Abadi dapat terlihat ketika melaksanakan kegiatan perlombaan memperingati hari kemerdekaan RI ke 70 pihak kelurahan sangat antusias dalam membantu kegiatan Karang Taruna Karya Abadi agar berjalan lancar. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil dokumentasi saat pelaksanaan kegiatan berlangsung, yaitu sebagai berikut.



Gambar 7. Antusias pihak kelurahan dan Kepala Desa Jepang dalam kegiatan perlombaan memperingati hari kemerdekaan RI ke 70. (Sumber: dokumentasi pribadi, 22 Agustus 2015).

Secara lebih rinci, hasil penelitian tentang implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi terkait dengan faktor pendorong akan dijelaskan sebagai berikut :

### **1) Sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana Karang Taruna merupakan pendukung utama dalam berlangsungnya suatu kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi tempat Karang Taruna untuk mengadakan rapat atau menyimpan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan Karang Taruna, teknologi yang selalu mengikuti perkembangan dan lain sebagainya yang mendukung terlaksananya suatu kegiatan.

Berdasarkan pengamatan penulis di Karang Taruna Karya Abadi desa Jepang, sarana dan prasarana telah mendukung terlaksananya suatu program kegiatan. Terlebih lagi fasilitas yang diberikan oleh pihak kelurahan kepada Karang Taruna Karya Abadi. Sarana dan prasarana tersebut antara lain aula balai desa Jepang yang bisa dipakai kapan saja untuk menunjang kegiatan Karang Taruna, serta sebuah ruko dari Kepala Desa yang diberikan kepada Karang Taruna yang dapat digunakan sebagai tempat pengembangan wirausaha oleh-oleh desa Jepang sebagai rintisan desa pariwisata. Hal ini juga diperkuat dengan hasil dokumentasi saat pelaksanaan kegiatan berlangsung, yaitu sebagai berikut.



Gambar 8. Salah satu ruko yang diberikan kepada Karang Taruna untuk menunjang rintisan desa pariwisata.

(Sumber: dokumentasi pribadi, 7 Agustus 2015)

## 2) Dukungan dari pihak kelurahan

Berhasilnya suatu kegiatan Karang Taruna tidak terlepas dari dukungan dari pihak kelurahan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada salah satu perangkat desa Jepang yaitu Bapak Bambang Sriyanto dalam kegiatan Karang Taruna yaitu :

“Saya sangat mendukung dengan adanya kegiatan Karang Taruna, karena dapat mengembangkan potensi yang ada .Setidaknya dapat mengisi waktu luang remaja khususnya generasi muda desa Jepang dengan hal-hal yang positif (wawancara tanggal 3 Agustus 2015)”.

Hal ini didukung dengan adanya pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Indarto, ST., sebagai kepala desa Jepang yaitu sebagai berikut :

”Selama kegiatan Karang Taruna Karya Abadi desa Jepang tersebut membawa dampak yang positif bagi generasi muda desa Jepang saya sangat mendukung kegiatan itu (wawancara tanggal 3 Agustus 2015)”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan terkait faktor pendukung dari pihak kelurahan yaitu pada kegiatan Karang Taruna mendapat dukungan yang sangat baik dari pihak kelurahan itu sendiri, dan mendukung semua kegiatan Karang Taruna Karya Abadi desa Jepang selama kegiatan tersebut dapat membawa dampak positif bagi pemuda desa Jepang yang mengikuti kegiatan Karang Taruna Karya Abadi desa Jepang.

**c. Faktor penghambat dalam implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.**

Implementasi nilai adalah sesuatu hal yang tidak mudah dilakukan, selain harus ada pendukung dalam pelaksanaannya hambatanpun seringkali ditemui. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di desa Jepang adalah sebagai berikut :

**1) Kurangnya partisipasi anggota**

Tidak dapat dipungkiri bahwa partisipasi anggota sangatlah penting dalam kegiatan Karang Taruna, karena kegiatan tidak akan berjalan sesuai rencana apabila partisipasi anggota tidak ada. Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna. Dari hasil observasi langsung yang dilakukan penulis, bahwa dalam prakteknya banyak para anggota Karang Taruna kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan Karang Taruna, sehingga banyak kegiatan yang tidak terealisasikan karena faktor tersebut. Sebanyak  $\pm$  40 orang anggota Karang Taruna Karya Abadi desa Jepang, sekurang-kurangnya hanya 15-25 orang yang masih aktif berpartisipasi dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi desa Jepang, itupun tidak semuanya aktif ketika kegiatan rapat berlangsung.

Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian di semua kegiatan yang aktif dalam partisipasi kegiatan Karang Taruna hanya beberapa orang. Seperti ketika penulis mengikuti rapat untuk acara di bulan Agustus dari 20 orang yang datang yang berpartisipasi aktif dalam mengeluarkan pendapat hanya 5-10 orang.

## **2) Kesibukan anggota diluar kegiatan Karang Taruna**

Kesibukan anggota Karang Taruna diluar kegiatan Karang Taruna juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi nilai demokrasi Pancasila. Kesibukan para anggota seperti sekolah, bekerja, dan sudah berkeluarga menjadi penyebab salah satunya kegiatan Karang Taruna tidak berjalan. Tidak dapat dipungkiri banyak anggota Karang Taruna Karya Abadi desa Jepang yang sudah bekerja maupun kuliah di luar kota. Hal ini yang menyebabkan susah nya para anggota Karang Taruna untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan Karang Taruna, karena kesibukan anggota diluar kegiatan Karang Taruna itu sendiri.

## **B. Pembahasan**

Dalam perkembangannya, organisasi telah menjadi semakin modern dan kompleks, salah satu dari organisasi ini adalah Karang Taruna. Organisasi Karang Taruna merupakan tulang punggung untuk kemajuan desa, karena salah satu tujuan dari Karang Taruna itu sendiri adalah terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi

muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis akan membahas mengenai:

**1. Implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.**

Dalam negara demokrasi pemerintahan yang berkuasa merupakan pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat, pemerintahan yang mengatur negara wajib mendapat dukungan dan partisipasi dari rakyat. Dukungan rakyat dapat diperoleh bila rakyat dilibatkan dalam proses pelaksanaan pemerintahan secara demokratis, karena Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, karena demokrasi yang di Indonesia atau biasa disebut dengan demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi yang lainnya.

Kansil (1986: 51) menyebutkan bahwa perbedaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi lainnya adalah pemerintahan demokrasi Pancasila yang pelaksanaannya berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam hal ini, implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna mengurus soal musyawarah



untuk mufakat, yang menganut faham kekeluargaan dan faham kebersamaan.

Dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di desa Jepang, mereka memperhatikan kedudukan, hak, dan kewajiban yang harus disamakan antar pengurus, menggunakan akal sehat dan hati nurani yang luhur serta memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melakukan permusyawaratan. Kemudian dalam merencanakan berbagai macam program-program kerja atau pengambilan keputusan, mereka selalu mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah itu sendiri menurut pengurus Karang Taruna Karya Abadi merupakan cara yang terbaik untuk mendapatkan sebuah keputusan terlepas ketika menuju mufakat dalam musyawarah, yang didalamnya terjadi silang pendapat, emosi yang kurang terkontrol karena mempertahankan sebuah pendapat.

Hal ini senada dengan pemikiran Kansil (1986: 51-52) yang menyebutkan bahwa sistem musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan ini demokrasi Pancasila tidak mengenal yang kuat (yang memperoleh suara terbanyak) menekan yang lemah, yang besar menekan yang kecil. Dalam demokrasi Pancasila dikenal dengan cara permusyawaratan antara semua anggota keluarga besar bangsa Indonesia untuk mencapai mufakat guna mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

Pada intinya semua pengurus Karang Taruna Karya Abadi desa Jepang harus dengan penuh kesadaran untuk beritikad baik dan mempunya

rasa bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah itu sendiri merupakan keputusan yang diperuntukan bagi kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi atau golongan.

Pernyataan di atas juga sesuai dengan teori Marzuki (2014: 7) mengungkapkan bahwa ciri demokrasi Pancasila yaitu menghargai hak asasi manusia, diakuinya keselarasan antara hak dan kewajiban, berlandaskan kekeluargaan dan gotong-royong, kedaulatan ditangan rakyat, serta pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **2. Faktor pendorong implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.**

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dihindarkan dengan interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial yang dijalin. Di lain pihak individu juga tidak dapat lepas dari situasi tempat dia berada dan situasi ini sangat berpengaruh terhadap kelompok yang terbentuk akibat situasi tersebut.

Menurut Hasibuan (2003: 24) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Hal ini selaras dengan tujuan kegiatan Karang Taruna salah satunya adalah

terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Dalam organisasi pasti terjadi hambatan maupun dukungan dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Dukungan itu sendiri dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang ada dalam kegiatan Karang Taruna maupun dari pihak kelurahan itu sendiri yang mendukung jalannya kegiatan dari Karang Taruna Karya Abadi. Salah satu bentuk dukungan pihak kelurahan tersebut dapat dilihat ketika Karang Taruna Karya Abadi melaksanakan kegiatan saat perlombaan memperingati hari kemerdekaan RI yang ke 70 pihak kelurahan sangat antusias membantu kelancaran acara tersebut. Selain itu fasilitas lainnya adalah ketika Karang Taruna melakukan kegiatan rapat untuk membahas acara perlombaan ini, Karang Taruna Karya Abadi di berikan sarana prasarana atau fasilitas yaitu boleh menggunakan aula Balai Desa Jepang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu rapat membahas kegiatan Karang Taruna Karya Abadi.

Selain itu, dukungan dari pihak kelurahan diwujudkan dengan mempercayakan dan mendukung setiap kegiatan Karang Taruna Karya Abadi asalkan membawa dampak positif bagi remaja desa Jepang. Terkait faktor yang mendukung implementasi nilai demokrasi

Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di desa Jepang mengenai pandangan tentang kegiatan Karang Taruna diantaranya memberikan manfaat antara lain memberikan pengetahuan dan pengalaman baru tentang bagaimana cara berorganisasi, menciptakan kerukunan dan kebersamaan diantara sesama, serta menjalin silaturahmi. Melalui Karang Taruna berbagai macam pendapat dan kreativitas dapat disalurkan, karena generasi muda merupakan agen perubahan. Hal ini selaras dengan pemikiran Sugiyarto (2010: 68-72) yang menyatakan bahwa kaum muda memiliki potensi yang sangat penting salah satunya adalah potensi sebagai agen perubahan. Siapapun akan mengakui, bahwa kaum muda merupakan asset penting bangsa. Ia sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*), dan pemegang kebijakan masa depan.

### **3. Faktor penghambat dalam implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus.**

Hambatan yang dialami Karang Taruna Karya Abadi dalam implementasi nilai demokrasi Pancasila salah satunya adalah partisipasi anggota. Partisipasi anggota dapat dilihat dari keaktifan anggota saat diadakanya rapat membahas kegiatan Karang Taruna. Disitu dapat dilihat mana anggota yang selalu aktif dalam mengeluarkan pendapat

dan mempertahankan pendapatnya serta anggota yang hanya ikut-ikutan saja. Hal tersebut merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu itu sendiri. Hal ini selaras dengan pemikiran Robbins (dalam Umar, 2003 : 15-16) yang menyatakan bahwa permasalahan pokok individu dalam organisasi misalnya: a) karakteristik biografis, seperti: usia, jenis kelamin, status keluarga, dan masa kerja, b) kemampuan intelektual dan kesehatan fisik, c) kepribadian, seperti: kesadaran diri, d) belajar, e) persepsi dan inisiatif dalam pengambilan keputusan, f) nilai, sikap, dan keputusan kerja, g) motivasi.

Implementasi nilai demokrasi Pancasila dapat berjalan apabila semua anggota Karang Taruna Karya Abadi berperan aktif dalam semua kegiatan yang ada dalam Karang Taruna, jika tidak maka, implementasi nilai demokrasi Pancasila sedikit terhambat. Organisasi dikatakan dapat berjalan salah satu faktornya yaitu dari partisipasi anggotanya sendiri, karena aktif atau tidaknya anggota sangatlah berpengaruh di kedepannya. Terlihat dari pengamatan penulis di setiap agenda rapat Karang Taruna setidaknya masih ada anggota yang masih aktif berperan dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di desa Jepang.

Hambatan selanjutnya dalam implementasi nilai demokrasi Pancasila adalah kesibukan para anggota diluar kegiatan Karang Taruna, tim kerja, serta kondisi eksternal kelompok Karang taruna itu

sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi tidak akan berjalan apabila tidak ada anggotanya atau anggotanya tidak aktif dalam organisasi tersebut. Hal ini dialami oleh organisasi Karang Taruna Karya Abadi di desa Jepang yang anggotanya memiliki kesibukan lain diluar kegiatan Karang Taruna seperti sudah berkeluarga, sekolah, dan anggota yang sudah kuliah diluar kota. Hal ini juga selaras dengan pemikiran Robbins (dalam Umar, 2003: 15-16) yang menyatakan bahwa permasalahan pokok kelompok dalam organisasi itu sendiri adalah: a) interaksi kelompok, b) perilaku kelompok c) sumber daya anggota kelompok, d) struktur kelompok, e) kondisi eksternal kelompok, f) proses kelompok, g) tugas kelompok, h) pengambilan keputusan kelompok, i) tim kerja, j) komunikasi, k) kepemimpinan, l) keleluasaan dan politik, m) konflik, perundingan, dan perilaku antar kelompok itu sendiri.

Oleh karena itu, salah satu faktor implementasi nilai demokrasi pancasila tidak berjalan sesuai rencana dan sedikit terhambat karena adanya kesibukan anggota diluar kegiatan Karang Taruna seperti yang sudah dijelaskan diatas serta perilaku kelompok yang ada pada Karang Taruna Karya Abadi itu sendiri. Setiap organisasi masalah ini merupakan masalah yang sangat klasik, karena setiap individu memiliki kesibukan tersendiri dan tidak selamanya akan aktif di organisasi itu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi adalah kebebasan menyampaikan pendapat yang mengutamakan kepentingan bersama, segala sesuatu diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
2. Faktor pendorong dalam implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo adalah ketika melaksanakan sebuah kegiatan dari pihak kelurahan memfasilitasi sarana dan prasarana seperti aula Balai Desa Jepang yang boleh dipergunakan untuk rapat guna membahas kegiatan Karang Taruna.
3. Faktor yang menghambat dalam implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo adalah kurangnya partisipasi anggota, kesibukan anggota Karang Taruna di luar kegiatan Karang Taruna itu sendiri, serta banyaknya para anggota Karang Taruna yang tidak aktif. Hambatan-hambatan tersebut terjadi karena

adanya permasalahan pokok individu dalam organisasi dan permasalahan pokok kelompok dalam organisasi tersebut. Permasalahan pokok individu dalam organisasi adalah kesadaran diri serta sikap terhadap sesama anggota Karang Taruna itu sendiri, sedangkan permasalahan pokok kelompok dalam organisasi adalah perilaku kelompok, interaksi kelompok, sumber daya anggota kelompok, serta kondisi eksternal kelompok.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Karang Taruna hendaknya memikirkan sumber daya anggota kelompok Karang Taruna yang semakin berkurang, membenahan struktur kelompok, kesadaran diri dalam berorganisasi, perilaku kelompok serta interaksi kelompok agar peran serta Karang Taruna dalam implementasi nilai Demokrasi Pancasila dapat diterapkan sesuai dengan keinginan melalui partisipasi anggota pada setiap kegiatan yang diadakan oleh Karang Taruna Karya Abadi.
2. Bagi anggota Karang Taruna diharapkan lebih memahami akan tugas dan tanggung jawab yang diimban dan semua pihak saling bekerja sama demi terwujudnya tujuan awal kegiatan Karang



Taruna yaitu terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

3. Bagi Pihak Kelurahan hendaknya mendorong atau mendampingi Karang Taruna serta ikut membantu mengaktifkan partisipasi masyarakat sekitar dalam kegiatan Karang Taruna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bakry, Noor Ms. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Dipoyudo, Kirdi. 1984. *Pancasila Arti Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Yayasan Proklamasi.
- Darmodiharjo. 1984. *Pancasila Dalam Beberapa Perspektif*. Jakarta: Aries Lima.
- Hazairin. 1990. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Organisasi dan motivasi Dasar Peningkatan Produktifitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Joeniarto. 1990. *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- MD, Moh Mahfud. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Suparman. 2014. *Demokrasi Pribumi*. Kupang-NTT: Bonet Pinggupir.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J.2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mulyana, Rohmat. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyasa. 2006. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mulyawan, Wawan. 2009. *Pedoman Dasar Karang Taruna*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Munir, Baderal. 2012. *Six Dimension Organization dengan Pendekatan Organization Development*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muslich, Masnur. 2014. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensiona*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Purbopranoto, Kuntjoro. 1982. *Hak-Hak Asasi Manusia Dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang: Unnes Press.
- Rakhman, Maman. 1993. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Rohidi, Tjetjep Rohendi. 2011. *Metodologi Penelitian Seni*. Semarang: Cipta Prima Nusantara Semarang.
- Rochmadi, Nur Wahyu. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan 2*. Jakarta: Yudhistira.
- Sihotang Kasdin, dkk. 2014. *Pendidikan Pancasila Upaya Internalisasi Nilai-nilai Kebangsaan*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Suyono, Haryono. 2009. *Menelusuri Kembali Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Nusantara Institute.
- Sulaeman, Zulkifi. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia (Pemikiran politik Bung Hatta)*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- Sugiyarto. 2010. *Memberdayakan Potensi kaum Muda*. Yogyakarta: Cempaka Putih.
- Suyahmo. 2014. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Semarang: Unnes press.
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.*
- WS, Anna. 2010. *Orang Muda dalam Proses Men-Jadi*. Jakarta: PT. perca.
- Wursanto. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi.
- Winarno. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Wahana, Paulus. 2005. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: KANISIUS.
- Yudhatama, Iranda. 2007. *Demokrasi Overdosis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zamroni. 2011. *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Jakarta: Gavin Kalam Utama.
- Zamroni. 2013. *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Ombak.
- Zuriah, Nurul. 2011. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Prubahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

**LAMPIRAN**

Lampiran 1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229  
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 6027 /UN37.1.3/LT/2015  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

30 JUN 2015

Yth. Kepala Desa Jepang Kecamatan Mejobo  
di

Kab. Kudus

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Setiana Eka Rini  
NIM : 3301411139  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan  
Prodi/Jenjang : PPKn (S1)  
Judul Skripsi : Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang  
Taruna Karya Abadi Di Desa Jepang Kecamatan Mejobo  
Kabupaten Kudus  
Alokasi Waktu : Juli s.d September 2015

Mohon perkenan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara Pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Dekan  
2. Ketua Jurusan PKN  
3. Mahasiswa yang bersangkutan  
FIS UNNES

Lampiran 2

**PEMERINTAH DESA JEPANG  
KECAMATAN MEJOBOWATI  
KABUPATEN KUDUS**

Jl. Suryo Kusumo No. 1 Jepang Mejobo Kudus

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Menunjuk surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Nomor : 5027/UN37.1.3/LT/2015 tertanggal 30 Juni 2015 perihal permohonan ijin penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami memberikan izin penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Setiana Eka Rini  
NIM : 3301411139  
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan  
Program Studi : PPKn (S1)

Untuk melakukan kegiatan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi Di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus"

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kudus, 6 Juli 2015

  
**KEPALA DESA JEPANG**  
  
**INDARTO, ST**

Lampiran 3

**PEMERINTAH DESA JEPANG  
KECAMATAN MEJOB  
KABUPATEN KUDUS**

Jl. Suryo Kusumo No. Jepang Mejobo Kudus

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Setiana Eka Rini  
NIM : 3301411139  
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan  
Program Studi : PPKn (S1)

Telah melakukan kegiatan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi Di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus" pada bulan Juli s.d September Tahun 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kudus, 28 September 2015  
**KEPALA DESA JEPANG**  
  
**INDARTO, ST**





*Lampiran 4*

**Susunan Pengurus Karang Taruna “Karya Abadi”**

**Periode 2015-2018**

**Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus**

Pelindung : Kepala Desa Jepang

Penasehat : Bambang Sugiyanto

Pembina : M.Ridwan

Pengawas : Khamdan

Ketua Umum : Muhammad Sholeh, S.Pd

Ketua I : Achmad Fakhrudin

Ketua II : Achmad Hasan

Sekretaris I : Kosnadi, SE

Sekretaris II : Setiana Eka Rini

Bendahara I : Yu'inul muna

Bendahara II : Najih Izzan zahrial

➤ Seksi Organisasi & Pengembangan SDM

Koordinator : Budi Ariyanto, M.Pd.I

Anggota : 1. Kusmanto  
2. Eva Zuliana

➤ Seksi Ekonomi & Koperasi

Koordinator : Alaikha Mustofa Kamal

Anggota : 1. Ulin Nuha  
2. Siti Aminah  
3. Anis Uswah Khasanah  
4. Rohmah

➤ Seksi Humas & Pengembangan Komunikasi

Koordinator : Joni Prabowo

Anggota : 1. Ahmad Zahlul Firza  
2. M. Taufiqurrohman  
3. Rif'an  
4. Deni  
5. Zein Setiabudi

➤ Usaha Kesejahteraan sosial

Koordinator : Nur Qomari

Anggota : 1. M. Saeful Anwar  
2. M. Riza ainun Najib  
3. Laila Muyassaroh

➤ Lingkungan Hidup & Pariwisata

Koordinator : Abdol Rouf

Anggota : 1. Maulina Nur Indah Sari  
2. Aminatul Malicha  
3. Moh. Mirza Arief Hilmawan  
4. Inarotul Islamiah

➤ Pengembangan Olahraga & Seni Budaya

Koordinator : Aldino agung, S.Pd

Anggota : 1. Rozikin  
2. Mauriska  
3. Andi Widodo

4. Yoga Ibrahim

5. Fitria Zulfa

6. Septian

➤ Seksi Kerohanian Pembinaan Mental

Koordinator : Abdu Nafi

Anggota : 1. Miftakhul Huda

2. Fatkhurrohman Azis

3. Qomarudin

Lampiran 5

**INSTRUMEN PENELITIAN**

<b>No</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Fokus Observasi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Item Pertanyaan</b>	<b>Pengumpulan Data</b>	<b>Subyek</b>
1	Bagaimanakah implementasi nilai demokrasi Pancasila dalam Karang Taruna di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kudus ?	Implementasi Demokrasi Pancasila dalam kegiatan Karang Taruna (mencakup permusyawaratan dan perwakilan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan progam kegiatan Karang Taruna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurut anda, pentingkah perencanaan progam sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan ?</li> <li>• Apakah dalam Karang Taruna selalu merencanakan progam sebelum kegiatan ?</li> <li>• Apakah dalam perencanaan progam itu dilaksanakan dengan musyawarah ?</li> <li>• Apakah perlu dilaksanakan musyawarah ? apa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> <li>• Observasi</li> <li>• Dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karang Taruna</li> <li>• Pihak Kelurahan</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>

				<p>alasanya ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan program tersebut ?</li><li>• Apakah setiap anggota terlibat aktif dalam musyawarah ?</li><li>• Bagaimanakah bentuk keterlibatan anggota dalam musyawarah tersebut ?</li><li>• Bagaimanakah cara para anggota menyampaikan pendapatnya. Apakah dengan mengutarakan pendapatnya langsung dalam forum yang sedang berjalan atau hanya bergumam sendiri di hati ?</li><li>• Bagaimana anggota yang lain menanggapi pendapat</li></ul>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>atau sanggahan tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apa saja yang dibahas ?</li><li>• Bagaimana cara mengambil keputusan dari berbagai pendapat dalam musyawarah tersebut ?</li><li>• Jika dalam musyawarah belum mendapatkan hasil yang disepakati bersama langkah apa yang dilakukan ?</li><li>• Apa saja bentuk kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan ?</li><li>• Bagaimana persiapan kegiatan tersebut ?</li><li>• Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut ?</li><li>• Bagaimana pelaksanaannya ?</li></ul>		
--	--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"><li>• Menurut anda, kegiatan yang telah dilaksanakan itu perlu dipertanggung jawabkan apa tidak ? Apa alasannya ?</li><li>• Dalam progam Karang Taruna terdapat progam kerja yang harus dilaksanakan. Menurut anda, dalam Karang Taruna ini pertanggungjawaban apa yang dilakukan setelah melaksanakan progam kegiatan tersebut ?</li><li>• Menurut anda, pertanggungjawaban progam kerja perlu dilakukan berapa kali ?</li><li>• Apakah dalam kegiatan</li></ul>		
--	--	--	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wujud pelaksanaan program kegiatan Karang Taruna.</li> </ul>	<p>Karang Taruna saling menghormati satu sama lain, misalnya saja saling mengucapkan salam ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah setiap anggota saling bertegur sapa ?</li> <li>• Apakah setiap anggota saling menghormati perbedaan pendapat dalam musyawarah ?</li> <li>• Bagaimana sikap anda apabila terjadi beda pendapat dan pendapat anda tidak digunakan ?</li> <li>• Apakah dalam kegiatan yang dilaksanakan selalu mengutamakan kerja sama ?</li> <li>• Bagaimana wujud pelaksanaan kerja sama</li> </ul>		
--	--	--	---	---	--	--



			<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluasi program kegiatan Karang Taruna.</li></ul>	tersebut ?		
--	--	--	--	------------	--	--

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Tata cara pergaulan dalam kegiatan Karang</li></ul>			
--	--	--	---	--	--	--

			Taruna.			
2	Adakah faktor pendorong implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejubo Kudus ?	Faktor pendorong implementasi nilai Demokrasi Pancasila dalam Karang Taruna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurut anda, pentingkah sarana dan prasarana dalam menunjang terlaksananya suatu kegiatan ?</li> <li>• Apakah sarana dan prasarana yang ada telah mendukung terlaksananya kegiatan dalam Karang Taruna?</li> <li>• Apa saja sarana dan prasarana Karang Taruna</li> </ul>		

				<p>yang mendukung proses kegiatan Karang Taruna ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sudahkah anda memanfaatkannya dengan optimal ?</li><li>• Jika belum, bagaimana cara anda untuk mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana tersebut ?</li><li>• Bagaimana peran pihak kelurahan dalam terlaksananya program kerja Karang Taruna ?</li><li>• Apakah anda mendukung dengan semua kegiatan Karang Taruna ?</li></ul>		
--	--	--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan dari pihak kelurahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dalam proses kegiatan Karang Taruna pihak kelurahan selalu terlibat ?</li> <li>• Jika iya, bagaimana keterlibatan pihak kelurahan dalam kegiatan Karang Taruna ?</li> </ul>		
3	Adakah faktor penghambat implementasi nilai Demokrasi Pancasila	Faktor penghambat implementasi nilai Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi anggota.</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dalam setiap kegiatan semua anggota Karang Taruna hadir ?</li> </ul>		

	<p>dalam Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejubo Kudus ?</p>	<p>Pancasila dalam Karang Taruna</p>	<p>sekitar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesibukan anggota di luar kegiatan Karang Taruna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana partisipasi setiap anggota dalam kegiatan Karang Taruna ?</li> <li>• Jika para anggota tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan, apa yang menjadi penyebabnya ?</li> <li>• Dengan adanya Karang Taruna tentu akan membuat setiap anggota membagi waktu, misalnya antara sekolah dan kegiatan Karang Taruna. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang hal tersebut ?</li> </ul>		
--	--	--------------------------------------	---	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"><li>• Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang Karang Taruna di desa ini ?</li></ul>		
--	--	--	--	--	--	--

Lampiran 6

**INSTRUMEN PENELITIAN**  
**IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA DALAM**  
**KEGIATAN KARANG TARUNA KARYA ABADI DI DESA JEPANG**  
**KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS**

---

Pedoman Observasi

Hari :  
Tanggal :  
Lokasi :

No.	Fokus Pengamatan	Keterangan
1.	<b>GAMBARAN UMUM KARANG TARUNA KARYA ABADI</b>  a. Keadaan geografis wilayah desa Jepang b. Kondisi Lingkungan c. Keadaan sosial ekonomi	
2.	<b>SARANA DAN PRASARANA DALAM IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA</b>  a. Fasilitas Karang Taruna b. Dukungan dari pihak kelurahan	
3.	<b>PELAKSANAAN IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA</b>  a. Dalam kegiatan Karang Taruna, dalam hal : 1) Perencanaan program 2) Pelaksanaan program 3) Evaluasi program	



*Lampiran 7*

**PEDOMAN DOKUMENTASI**  
**IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA DALAM**  
**KEGIATAN KARANG TARUNA KARYA ABADI DI DESA JEPANG**  
**KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS**

---

Lokasi :

Waktu :

Aspek yang Diamati :

- A. Deskripsi umum Karang Taruna Karya Abadi, meliputi:
  - 1. Kondisi geografis desa Jepang Kecamatan Mejoblo Kabupaten Kudus.
  - 2. Kondisi lingkungan Karang Taruna Karya Abadi.
  - 3. Fasilitas Karang Taruna Karya Abadi.
  
- B. Foto-foto yang mencakup:
  - 1. Foto kegiatan Karang Taruna.
  
- C. Dokumen-dokumen yang meliputi:
  - 1. Struktur organisasi Karang Taruna Karya Abadi.
  - 2. Program kerja Karang Taruna Karya Abadi

*Lampiran 8*

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA DALAM**  
**KEGIATAN KARANG TARUNA KARYA ABADI DI DESA JEPANG**  
**KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS**

---

**Narasumber : Anggota Karang Taruna**

**Nama :**

**Umur :**

**Alamat :**

**Pekerjaan :**

1. Apa yang anda ketahui tentang Karang Taruna ?
2. Menurut anda, pentingkah perencanaan program sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan ?
3. Apakah dalam Karang Taruna selalu merencanakan program sebelum kegiatan ?
4. Apakah dalam perencanaan program itu dilaksanakan dengan musyawarah ?
5. Apakah perlu dilaksanakan musyawarah ? apa alasannya ?
6. Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan program tersebut ?
7. Apakah setiap anggota terlibat aktif dalam musyawarah ?
8. Bagaimanakah bentuk keterlibatan anggota dalam musyawarah tersebut ?
9. Bagaimanakah cara para anggota menyampaikan pendapatnya. Apakah dengan mengutarakan pendapatnya langsung dalam forum yang sedang berjalan atau hanya bergumam sendiri di hati ?
10. Bagaimana anggota yang lain menanggapi pendapat atau sanggahan tersebut ?
11. Apa saja yang dibahas ?
12. Bagaimana cara mengambil keputusan dari berbagai pendapat dalam musyawarah tersebut ?
13. Jika dalam musyawarah belum mendapatkan hasil yang disepakati bersama langkah apa yang dilakukan ?
14. Apa saja bentuk kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan ?

15. Bagaimana persiapan kegiatan tersebut ?
16. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut ?
17. Bagaimana pelaksanaannya ?
18. Menurut anda, kegiatan yang telah dilaksanakan itu perlu dipertanggung jawabkan apa tidak ? Apa alasannya ?
19. Dalam program Karang Taruna terdapat program kerja yang harus dilaksanakan. Menurut anda, dalam Karang Taruna ini pertanggungjawaban apa yang dilakukan setelah melaksanakan program kegiatan tersebut ?
20. Menurut anda, pertanggungjawaban program kerja perlu dilakukan berapa kali ?
21. Apakah dalam kegiatan Karang Taruna saling menghormati satu sama lain, misalnya saja saling mengucapkan salam ?
22. Apakah setiap anggota saling bertegur sapa ?
23. Apakah setiap anggota saling menghormati perbedaan pendapat dalam musyawarah ?
24. Bagaimana sikap anda apabila terjadi beda pendapat dan pendapat anda tidak digunakan ?
25. Apakah dalam kegiatan yang dilaksanakan selalu mengutamakan kerja sama ?
26. Bagaimana wujud pelaksanaan kerja sama tersebut ?
27. Menurut anda, pentingkah sarana dan prasarana dalam menunjang terlaksananya suatu kegiatan ?
28. Apa saja sarana dan prasarana Karang Taruna yang mendukung proses kegiatan Karang Taruna ?
29. Sudahkah anda memanfaatkannya dengan optimal ?
30. Apakah dalam setiap kegiatan semua anggota Karang Taruna hadir ?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA DALAM**  
**KEGIATAN KARANG TARUNA KARYA ABADI DI DESA JEPANG**  
**KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS**

---

**Narasumber : Pihak Kelurahan**

**Nama :**

**Umur :**

**Alamat :**

**Pekerjaan :**

1. Apa yang anda ketahui tentang Karang Taruna ?
2. Bagaimana peran pihak kelurahan dalam terlaksananya progam kerja Karang Taruna ?
3. Apakah anda mendukung dengan semua kegiatan Karang Taruna ?
4. Apakah dalam proses kegiatan Karang Taruna pihak kelurahan selalu terlibat ?
5. Jika iya, bagaimana keterlibatan pihak kelurahan dalam kegiatan Karang Taruna ?
6. Menurut anda, pentingkah sarana dan prasarana dalam menunjang terlaksananya suatu kegiatan ?
7. Apakah sarana dan prasarana yang ada telah mendukung terlaksananya kegiatan dalam Karang Taruna?
8. Apa saja sarana dan prasarana Karang Taruna yang mendukung proses kegiatan Karang Taruna ?
9. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang Karang Taruna di desa ini ?
10. Menurut anda apakah dalam kegiatan Karang Taruna telah menunjukkan nilai-nilai demokrasi Pancasila ?
11. Jika sudah, bagaimana wujud dari pelaksanaan tersebut ?

12. Menurut anda, apakah dalam merencanakan suatu kegiatan Karang Taruna harus menggunakan musyawarah ?
13. Apakah pihak kelurahan terlibat dalam mengembangkan budaya demokrasi Pancasila pada Karang Taruna tersebut ?
14. Bagaimana peran serta pihak kelurahan dalam mengembangkan budaya demokrasi pada Karang Taruna, khususnya demokrasi Pancasila ?
15. Menurut anda, sejauh ini apakah anggota Karang Taruna telah mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam setiap kegiatannya ?
16. Jika sudah, bagaimana bentuk pelaksanaannya ?
17. Apa saja yang menjadi penghambat dalam kemajuan Karang Taruna ?
18. Bagaimana sikap anda dalam menanggapi hal tersebut ?
19. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar dengan adanya Karang Taruna Karya Abadi ini ?
20. Bagaimanakah interaksi antara masyarakat dengan anggota Karang Taruna ?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA DALAM**  
**KEGIATAN KARANG TARUNA KARYA ABADI DI DESA JEPANG**  
**KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS**

---

**Narasumber : Masyarakat**

**Nama :**

**Umur :**

**Alamat :**

**Pekerjaan :**

1. Apa yang anda ketahui tentang Karang Taruna ?
2. Bagaimana tanggapan anda tentang Karang Taruna di desa ini ?
3. Bagaimana sikap anda apabila pihak Karang Taruna meminta bantuan dalam proses kegiatan Karang Taruna ?
4. Apakah anda sering berkumpul dan bergaul dengan pihak Karang Taruna ?
5. Jika iya, apa manfaat yang anda dapat jika berbaur dengan pihak Karang Taruna ?
6. Apa yang anda ketahui tentang demokrasi ?
7. Menurut anda, penting atau tidak adanya musyawarah dalam kegiatan Karang Taruna ?
8. Jika iya, bagaimana wujud pelaksanaannya ?
9. Menurut anda, apakah Karang Taruna wadah generasi muda untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya ?
10. Apa manfaat yang dapat diambil dari kegiatan Karang Taruna ?
11. Jika anda memiliki saudara/anak yang sudah cukup umur, setujukah bila bergabung dengan Karang Taruna ?
12. Menurut anda apakah masyarakat sekitar mendukung dengan semua kegiatan Karang Taruna ?
13. Jika iya, apakah anda menanggapi hal itu dengan positif ? Berikan alasannya !

14. Apakah Karang Taruna Karya Abadi selalu mengadakan pertemuan rutin ?
15. Jika iya, berapa jangka waktu untuk mengadakan pertemuan itu ?
16. Menurut anda, apakah pihak kelurahan terlibat dalam terlaksananya program kerja Karang Taruna ?
17. Jika iya, bagaimana keterlibatan pihak kelurahan yang anda ketahui dalam kegiatan Karang Taruna ?
18. Dengan adanya Karang Taruna tentu akan membuat setiap anggota membagi waktu, misalnya antara sekolah dan kegiatan Karang Taruna. Bagaimana tanggapan anda tentang hal tersebut, khususnya bagi orang tua yang anaknya mengikuti kegiatan Karang Taruna ?
19. Menurut anda, bagaimana partisipasi setiap anggota dalam kegiatan Karang Taruna ?
20. Apakah setiap anggota Karang Taruna saling bertegur sapa saat bertemu dengan masyarakat sekitar ?

Lampiran 9

**Nama-nama Informan**

**Anggota Karang Taruna Karya Abadi**

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Muhammad Sholeh, S.Pd.	Ketua Umum	Ds. Jepang
2	Bambang Sugiyanto	Penasehat	Ds. Jepang
3	Yu'inul Muna	Bendahara 1	Ds. Jepang
4	Kosnadi, SE.	Sekretaris	Ds. Jepang
5	Siti Aminah	Anggota	Ds. Jepang
6	Ahmad Zahlul Firza	Anggota	Ds. Jepang
7	Kusmanto	Anggota	Ds. Jepang
8	Abdol Rouf	Anggota	Ds. Jepang
9	M. Mirza Arief Hilmawan	Anggota	Ds. Jepang
10	Joni Prabowo	Anggota	Ds. Jepang

**Masyarakat Desa Jepang**

No	Nama	Alamat
1	Bapak Sabar	Ds. Jepang
2	Bapak Sami'an	Ds. Jepang
3	Bapak Gunadi	Ds. Jepang
4	Bapak Slamet	Ds. Jepang
5	Bapak Syafiq	Ds. Jepang

**Pemerintah Desa Jepang**

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Indarto, ST.	Kepala Desa	Ds. Jepang
2	Bambang Sriyanto	Perangkat Desa	Ds. Jepang
3	Chamdan	Perangkat Desa	Ds. Jepang
4	Komarudin	Perangkat Desa	Ds. Jepang
5	Zamroni, SE.	Perangkat Desa	Ds. Jepang